



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2025

KECAMATAN NUHA
KABUPATEN LUWU TIMUR

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Nuha Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. LKjIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Nuha dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun Anggaran 2025, sekaligus sebagai wujud penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tahun 2025 merupakan tahun yang strategis karena berada pada masa transisi dan irisan dua periode Rencana Strategis (Renstra), yaitu Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2021–2026 dan Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, pembahasan kinerja dalam laporan ini disusun dengan memperhatikan kesinambungan sasaran, indikator, dan arah kebijakan dari kedua dokumen perencanaan tersebut.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Untuk itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan sebagai bahan perbaikan pada masa yang akan datang.

Sorowako, 13 Maret 2026

Kecamatan Nuha,



ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom, M.Si.

Pangkat : Pembina

NIP. 19810204 200902 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	4
1. LATAR BELAKANG	4
2. PENJELASAN UMUM ORGANISASI	4
2.1. KONDISI GEOGRAFIS.....	4
2.2. STRUKTUR ORGANISASI.....	5
2.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	5
2.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI	9
2.5. ISU STRATEGIS	13
2.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	14
BAB II PERENCANAAN KINERJA	16
2.1. RENCANA STRATEGIS	16
2.1.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH	16
2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	19
2.1.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA	20
2.2. PERJANJIAN KINERJA.....	21
2.3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	25
A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi	41
B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun lalu Dan Beberapa Tahun terakhir	44
C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra.....	50
D. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Regional/Nasional...	54
E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan	56
F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	61

G. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	70
3.2. REALISASI ANGGARAN.....	73
3.3 REKOMENDASI.....	76
3.4 TINDAK LANJUT	76
BAB IV	79
PENUTUP	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	82

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan dokumen yang menggambarkan tingkat pencapaian hasil pelaksanaan program dan kegiatan suatu instansi pemerintah dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Penyusunan LKjIP Kecamatan Nuha Tahun 2025 mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait SAKIP serta dokumen perencanaan kinerja yang telah ditetapkan.

Tahun 2025 memiliki kekhasan tersendiri karena menjadi tahun evaluasi lanjutan Renstra 2021–2026 sekaligus tahun awal implementasi Renstra 2025–2029. Kondisi ini menuntut adanya kesinambungan perencanaan dan konsistensi arah pembangunan kecamatan.

2. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

2.1. KONDISI GEOGRAFIS

Kecamatan Nuha merupakan salah satu dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Luwu Timur dan dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270). Luas wilayah 859,71 Km² atau 12,74% Luasan tersebut membawa kecamatan Nuha sebagai kecamatan terluas kelima dari sebelas kecamatan yang ada di Luwu Timur. Di sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Wasuponda dan sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kecamatan Towuti.. Kecamatan Nuha terdiri dari 4 (Empat) Desa dan 1 (satu) Kelurahan yaitu:

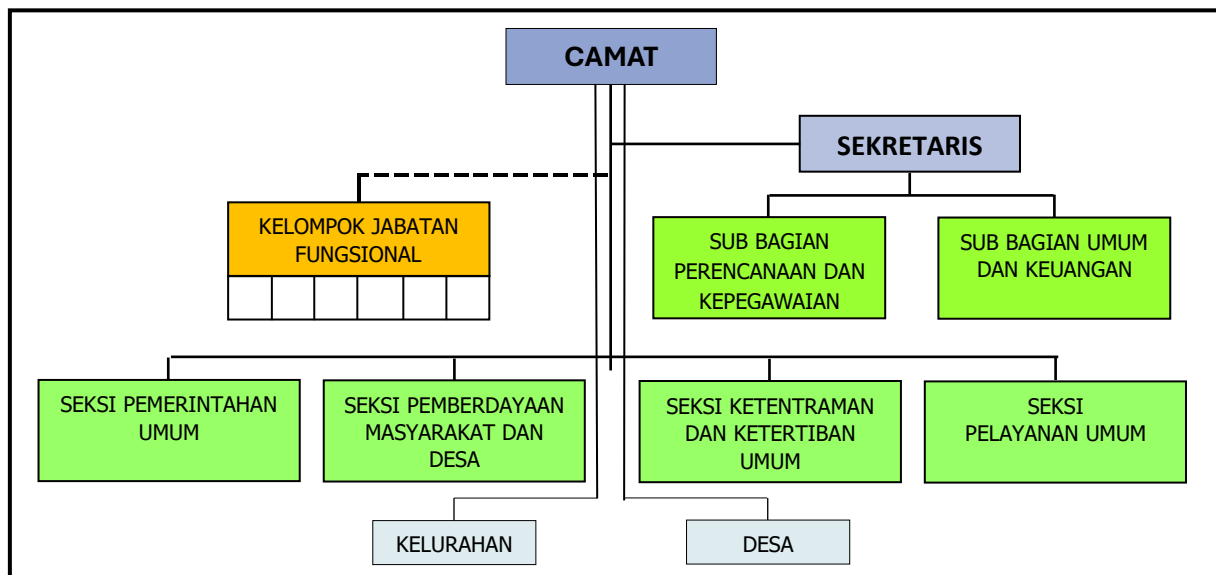
1. Desa Matano
2. Desa Sorowako
2. Desa Nuha
3. Desa Nikkel
4. Kelurahan Magani

2.2. STRUKTUR ORGANISASI

Pembentukan Organisasi Kecamatan Nuha ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur. Kedudukan Kecamatan yang dipimpin oleh Camat merupakan Lembaga Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dimana Camat bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan Kelurahan/ Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur. dapat dilihat pada gambar 1.1. sebagai berikut:

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Nuha



2.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Camat

Camat mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- Menyelenggarakan dan mengoordinasikan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan;

- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
- g. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang pemberdayaan masyarakat desa;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- d. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum.
- e. Pelaksanaan fungsi lain sesuai bidang tugas.

2. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;

- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

2.1. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan kepegawaian;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang perencanaan dan kepegawaian;
- c. Pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sub Bagian Umum dan Keuangan

Sub Bagian Umum dan Keuangan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan keuangan;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pemerintahan Umum

Seksi Pemerintahan Umum dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemerintahan Umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan

Umum;

- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemerintahan Umum; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketentraman dan ketertiban umum; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Umum;

- b. Pemberian dukungan atas pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan umum; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.4. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

2.4.1. Aspek Eksternal

Aspek eksternal yang mendukung keberhasilan antara lain:

1. Dukungan pemerintah ditingkat lebih tinggi:

Pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pusat memiliki peran penting dalam menyediakan kebijakan, regulasi, serta alokasi sumber daya yang mendukung pemerintahan di tingkat kecamatan diantaranya kebijakan desentralisasi memberikan kewenangan lebih besar kepada kecamatan untuk mengelola urusan lokal.

2. Kondisi Sosial dan Budaya:

Penduduk Kecamatan Nuha terdiri dari berbagai suku dan agama. Dari kemajemukan tersebut menciptakan kondisi sosial dan budaya yang harmonis.

3. Stabilitas Keamanan:

Stabilitas keamanan memberikan iklim yang kondusif bagi pemerintah Kecamatan Nuha untuk bekerja tanpa gangguan konflik atau ketidakstabilan keamanan.

4. Partisipasi Masyarakat:

Keterlibatan aktif masyarakat dalam program-program pemerintahan, seperti musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), sangat berpengaruh. Partisipasi ini mencakup dukungan ide, tenaga, dan sumber daya masyarakat untuk program pemerintah.

2.4.2. Aspek Internal

Aspek internal yang mendukung terbagi atas 3 komponen yaitu:

1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dalam memberikan pelayanan publik, Kecamatan Nuha pada tahun 2024 didukung oleh 12 orang PNS yang terdiri dari:

- a. Eselon III/A sebanyak 1 orang
- b. Eselon III/B sebanyak 1 orang
- c. Eselon IV/A sebanyak 4 orang
- d. Eselon IV/B sebanyak 2 orang
- e. Pelaksana sebanyak 6 orang
- f. PPPK pelaksana sebanyak 4 orang

selain itu, untuk mengatasi kekurangan tenaga PNS, Kantor Kecamatan Nuha juga didukung oleh 2 orang tenaga upah jasa.

Berikut data PNS dan upah jasa pada Kantor Kecamatan Nuha tahun 2025:

A. Jumlah PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan.

Tabel I.1.

Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan
Kantor Kecamatan Nuha Tahun 2025

No	Golongan	S-3 / S-2		S-1 / D-4		D-1 / D-3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD/ Sederajat		Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Golongan IV	1		1										2	
2	Golongan III		2		7		2								11
3	Golongan II							1	2					1	2
4	Golongan IX				2										2
5	Golongan X								2						2
JUMLAH														3	17

Sumber: Diolah dari Data Kepegawaian Kecamatan Nuha 2025

Tabel I.1. di atas, menunjukkan bahwa jumlah PNS pada Kecamatan Nuha sebanyak 16 orang, PPPK sebanyak 4 Orang yang melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Nuha sebagaimana digambarkan dalam grafik dibawah ini:

B. Jumlah pejabat Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin.

Komposisi pejabat struktural pada Kantor Kecamatan Nuha tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.2.

Jumlah Pejabat Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin Kecamatan Nuha Tahun 2025

No	ESELON	S-3 / S-2		S-1 / D-4		D-1 / D-3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD/ Sederajat		Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	III/A	1												1	0
2	III/B			1										1	0
3	IV/A				6										6
4	IV/B			2										2	0
JUMLAH														6	2

Sumber: Diolah dari Data Kepegawaian Kecamatan Nuha 2025

Berdasarkan Tabel 1.2. di atas menunjukkan bahwa jumlah pejabat struktural sebanyak 8 (Delapan) orang yang didominasi oleh perempuan sebanyak 6 (orang) orang, dan laki-laki sebanyak 2 (dua) orang.

C. Jumlah Tenaga Upah Jasa dan Tenaga Sukarela Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin.

Jumlah Tenaga Upah Jasa pada Kantor Kecamatan Nuha tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel I.3.

Jumlah Tenaga Upah Jasa dan Sukarela berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis Kelamin Kecamatan Nuha Tahun 2025

No	TENAGA UPAH JASA DAN SUKARELA	S-3 / S-2		S-1 / D-4		D-1 / D-3		SLTA/ Sederajat		SMP/ Sederajat		SD/ Sederajat		Total	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1	Tenaga Upah Jasa				1				1		1				3
JUMLAH															3

Sumber: Diolah dari Data Kepegawaian Kecamatan Nuha 2025

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Kantor Kecamatan Nuha meliputi tanah, bangunan, peralatan dan mesin, serta jaringan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel I.4.

Sarana dan Prasarana Pendukung
Kecamatan Nuha Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
	Kecamatan :		
1.	Rujab	1 Unit	Baik
2.	Gedung Kantor	1 Unit	Baik
4.	Tanah Bangunan Rujab	7,574 M2	Baik
5.	Tanah Bangunan E-KTP	1,559M2	Baik
6	Mobil	1 unit	Baik
7.	Sepeda motor	2 unit	Baik

Sumber: Sub Bagian Umum dan Keuangan

3. Sumber Daya Anggaran:

Sumber Daya Anggaran yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparatur Kantor Kecamatan Nuha bersumber dari dana APBD Kabupaten Luwu Timur sebagai berikut:

Tabel I.5.

Sumber Daya Anggaran

KODE REK	URAIAN	JUMLAH
5.1.	BELANJA OPERASI	Rp.3.932.951.208
5.1.01.	Belanja Pegawai	Rp. 2.766.498.802
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	Rp.1.166.452.406
5.2	BELANJA MODAL	Rp.10.300.000

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran Efisiensi Kecamatan Nuha T.A 2025

2.5. ISU STRATEGIS

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Pemerintah Kecamatan Nuha dituntut lebih transparan, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan lebih tepat sasaran. Untuk itu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Adapun isu-isu yang akan dihadapi Kecamatan Nuha tidak terlepas dari permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten Luwu Timur antara lain:

1. Tuntutan masyarakat dalam menerima pelayanan publik yang prima;
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana yang tercantum didalam Renstra Kecamatan Nuha yang mencakup strategi kebijakan program dan kegiatan. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Nuha sebagai berikut :

1. Membangun sistem pelayanan prima yang cepat, tepat, efisien dan transparan.
2. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan akuntabilitas.
3. Menetapkan kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

Memperhatikan isu-isu permasalahan diatas terkait dengan pelayanan kepada masyarakat, diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan mampu menghadirkan dan mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik dari sebelumnya.

2.6. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKJ) Kecamatan Nuha tahun 2025 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic Issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menguraikan tentang ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan target dan realisasi tahun ini;
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Perbandingan kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

3.2. Realisasi Anggaran:

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja.

3.3. Rekomendasi

Pada Sub ini diuraikan rekomendasi Akip Tahun lalu berdasarkan LHE Inspektorat terhadap Akip Kecamatan Nuha Tahun 2024

3.4. Tindak Lanjut

Pada sub ini diuraikan tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHE Inspektorat tahun lalu

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja ditahun kedepannya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Bab ini menjelaskan perencanaan kinerja Kecamatan Nuha Tahun 2025 dengan menempatkan tahun berjalan sebagai periode strategis yang berada pada irisan dua Rencana Strategis (Renstra), yaitu Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2021–2026 dan Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, perencanaan kinerja tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target tahunan, tetapi juga diarahkan untuk menjaga kesinambungan sasaran jangka menengah serta menyiapkan fondasi implementasi Renstra periode berikutnya.

Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2021–2026 merupakan landasan utama perencanaan kinerja pada sebagian besar periode pelaksanaan Tahun 2025. Sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra ini difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan publik, dan peningkatan akuntabilitas kinerja

Pada Tahun 2025, khususnya pada triwulan I sampai III perencanaan kinerja masih mengacu pada sasaran dan indikator Renstra 2021–2026 namun untuk Triwulan IV sasaran dan Indikator Kinerja telah Mengacu pada Renstra 2025-2029

2.1.1 VISI DAN MISI KEPALA DAERAH

A. VISI

Visi Kepala Daerah merupakan gambaran kondisi ideal pembangunan daerah yang ingin diwujudkan dalam jangka menengah dan menjadi arah utama bagi seluruh perangkat daerah, termasuk Kecamatan Nuha, dalam merumuskan sasaran strategis dan kinerja tahunan. Pada Tahun 2025, Kecamatan Nuha melaksanakan kinerja dalam konteks transisi perencanaan, yaitu sebagai tahun terakhir pelaksanaan Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2021–2025 sekaligus tahun awal implementasi Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2025–2029.

Pada periode Renstra 2021–2025, implementasi visi Kepala Daerah di tingkat kecamatan lebih difokuskan pada upaya **pemenuhan standar dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**, dengan penekanan pada pembenahan tata kelola, peningkatan kapasitas aparatur, serta penguatan fungsi koordinasi kewilayahan. Capaian pada periode ini menjadi fondasi awal bagi

terwujudnya visi Kepala Daerah, meskipun masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan sumber daya dan belum optimalnya kualitas layanan pada beberapa aspek.

Memasuki Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2025–2029, visi Kepala Daerah diterjemahkan secara lebih tajam dan operasional melalui sasaran strategis kecamatan yang berorientasi pada **peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkelanjutan, penguatan akuntabilitas kinerja, serta peran kecamatan sebagai penggerak tata kelola pemerintahan wilayah**. Penekanan tidak lagi semata pada pemenuhan kewajiban administratif, tetapi pada penciptaan nilai tambah bagi masyarakat melalui pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan responsif.

Berdasarkan kondisi umum masyarakat Kabupaten Luwu Timur saat ini, permasalahan yang dihadapi, tantangan yang dihadapi dalam lima tahun mendatang dan sesuai dengan cita-cita pemerintah Kabupaten Luwu Timur tahun 2025-2029 maka visi Kabupaen Luwu Timur yang ingin di wujudkan adalah :

“Luwu Timur Maju dan Sejahtera”

Penjelasan dari masing-masing elemen visi di atas adalah sebagai berikut :

- **“maju”** Mengandung makna kondisi dimana Luwu Timur mencapai kemajuan alam ekonomi, infrastruktur, dan tatakelola melalui peningkatan daya saing ekonomi, pembangunan wilayah yang merata, serta pemerintahan yang efektif dan berbasis digital. Ini ditandai dengan ekonomi yang tumbuh, konektivitas yang baik, pelayanan publik yang efektif dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan. investasi .
- **“Sejahtera”** mengandung makna kondisi dimana Luwu Timur mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, berbudaya, dan berdaya saing, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terintegrasi, serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Kondisi ini tercermin dari pemerataan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, penurunan tingkat kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang

bersifat inklusif, serta terjaganya kelestarian lingkungan hidup sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

B. MISI

Misi Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur merupakan penjabaran operasional dari visi pembangunan daerah yang menekankan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, pembangunan wilayah, serta kesejahteraan masyarakat. Bagi Kecamatan Nuha, misi tersebut menjadi pedoman dalam penetapan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang relevan dengan tugas dan fungsi kecamatan.

Pada periode Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2021–2026, pelaksanaan misi Kepala Daerah diwujudkan melalui program dan kegiatan yang berorientasi pada:

1. peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan,
2. penyediaan pelayanan administrasi yang tertib dan sesuai standar,
3. serta penguatan koordinasi dan pembinaan terhadap pemerintahan desa.

Pelaksanaan misi pada periode ini telah berkontribusi terhadap stabilitas pemerintahan dan peningkatan pelayanan, namun masih berfokus pada pemenuhan kewajiban administratif dan penguatan kapasitas dasar aparatur.

Dalam Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2025–2029, pelaksanaan misi Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur diarahkan secara lebih tajam dan berorientasi hasil. Kecamatan Nuha memfokuskan perannya pada:

- Peningkatan kualitas pelayanan publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat, melalui pelayanan yang cepat, pasti, dan berorientasi kepuasan.
- Penguatan tata kelola pemerintahan dan akuntabilitas kinerja, sejalan dengan misi daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.
- Optimalisasi peran kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan desa, guna mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

- Peningkatan ketenteraman dan ketertiban wilayah, sebagai prasyarat bagi keberlanjutan pembangunan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Melalui penajaman pelaksanaan misi tersebut, kinerja Kecamatan Nuha Tahun 2025 diarahkan tidak hanya sebagai kelanjutan Renstra 2021–2025, tetapi sebagai fondasi awal pencapaian target Renstra 2025–2029, sekaligus sebagai wujud nyata dukungan kecamatan terhadap pelaksanaan misi Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur. Misi Ke-5 “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital”, Misi ini mencakup upaya penguatan kelembagaan dan tata-laksana pemerintahan daerah melalui transformasi reformasi birokrasi, penguatan sistem pemerintahan berbasis digital, meningkatkan kompetensi sumberdaya aparatur, mendorong transparansi dan akuntabilitas birokrasi, menertibkan pengelolaan keuangan dan aset daerah, dan memperbaiki administrasi pemerintahan umum serta mengembangkan kerjasama, multipihak dalam mendorong inovasi dan akselerasi pembangunan daerah.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Pada Tahun 2025, perumusan dan pencapaian tujuan serta sasaran strategis Kecamatan Nuha berada dalam masa transisi antara **Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2021–2026** dan **Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2025–2029**. Renstra 2021–2026 mengacu pada Visi RPJMD *Kabupaten Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya* dengan Misi ke-4, yang diarahkan pada peningkatan kapasitas pelayanan publik dan penguatan akuntabilitas kinerja serta keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan.

Seiring dengan ditetapkan RPJMD baru dengan Visi *Luwu Timur Maju dan Sejahtera* dan Misi ke-5, Kecamatan Nuha menyusun Renstra 2025–2029 dengan penajaman tujuan menjadi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas. Tujuan tersebut dijabarkan ke dalam sasaran strategis berupa meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, yang menekankan prinsip pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, bersih, dan didukung transformasi digital.

Dalam konteks pelaksanaan kinerja Tahun 2025, khususnya pada **Triwulan IV**, Kecamatan Nuha telah menggunakan **Renstra 2025–2029** sebagai acuan utama perencanaan dan pengukuran kinerja. Oleh karena itu, capaian kinerja Tahun 2025 dalam LKjIP tidak hanya mencerminkan hasil akhir pelaksanaan Renstra 2021–2026, tetapi juga menjadi fondasi awal pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra 2025–2029 secara berkelanjutan.

Tujuan dan sasaran Kecamatan Nuha 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.

Tujuan dan Sasaran Strategis

VISI RPJMD: LUWU TIMUR MAJU DAN SEJAHTERA		
MISI 5:	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transformasi digital	
NO	TUJUAN	SASARAN
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik yang berkualitas	1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat

2.1.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Nuha digunakan sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam dua periode perencanaan, yaitu Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2021–2026 dan Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2025–2029. Meskipun terjadi penyesuaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pada Renstra 2025–2029, indikator kinerja utama yang digunakan tetap sama, yaitu **Nilai AKIP** dan **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**, guna menjaga kesinambungan dan keterbandingan capaian kinerja antarperiode.

Indikator **Nilai AKIP** digunakan untuk mengukur sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Pada Renstra 2021–2026, indikator ini lebih difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan dan kepatuhan terhadap sistem akuntabilitas kinerja. Dalam Renstra 2025–2029, Nilai AKIP tetap dipertahankan dengan penekanan yang lebih kuat pada kualitas kinerja, efektivitas

pelaksanaan program, serta pemanfaatan sistem pemerintahan berbasis digital sesuai arah Misi ke-5 RPJMD Kabupaten Luwu Timur.

Selanjutnya, indikator **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** digunakan untuk mengukur sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat pada kedua periode Renstra. Pada Renstra sebelumnya, IKM menjadi alat ukur pemenuhan standar pelayanan, sedangkan pada Renstra 2025–2029 indikator ini dimaknai sebagai cerminan pelayanan publik yang semakin responsif dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Pada Tahun 2025, khususnya Triwulan IV, penggunaan kedua indikator tersebut menjadi dasar pengukuran kinerja awal pelaksanaan Renstra 2025–2029 sekaligus memastikan kesinambungan arah kinerja Kecamatan Nuha.

Tabel 2.2.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik yang berkualitas	1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Kecamatan Nuha Tahun 2025 merupakan komitmen kinerja antara Camat Nuha dengan Bupati Luwu Timur sebagai dasar pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan dokumen perencanaan yang berlaku, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Kecamatan Nuha, serta Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dengan memperhatikan kondisi transisi perencanaan antara Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2021–2026 dan Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2025–2029.

Dalam Tahun 2025, Perjanjian Kinerja Kecamatan Nuha memuat tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama, target kinerja, serta dukungan anggaran

yang disepakati. Pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III, penetapan target kinerja masih mengacu pada Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2021–2026, sedangkan pada Triwulan IV Tahun 2025 dilakukan penyesuaian dengan Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2025–2029 sebagai acuan baru. Penyesuaian tersebut dilakukan untuk memastikan kesinambungan arah kebijakan serta keselarasan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur yang baru.

Perjanjian Kinerja menjadi instrumen utama dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Nuha, karena berfungsi sebagai alat pengendali pelaksanaan program dan kegiatan serta dasar penilaian capaian kinerja. Melalui Perjanjian Kinerja, diharapkan seluruh unit kerja dan aparatur di lingkungan Kecamatan Nuha memiliki pemahaman yang sama terhadap target kinerja yang harus dicapai, sehingga pelaksanaan kinerja Tahun 2025 dapat berjalan secara efektif, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Nuha Tahun 2025:

Tabel 2.3.

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2025
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	66
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,50
	SASARAN PROGRAM		
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100%
4	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%
5	Meningkatnya pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100%
6	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100%
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	100%
8	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar	100%

		dan ketentuan perundangan yang berlaku	
--	--	--	--

2.3 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2025 yang terdiri dari 6 (enam) Program dengan anggaran sebesar **Rp.3.976.522.458,-** dengan gambaran sebagai berikut:

Tabel 2.4.

Program pada DPA Perubahan Tahun 2025.

No	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.584.477.458
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	7.434.850
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	321.644.950
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.050.850
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	32.623.000
VI	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.291.350

Sumber: DDPA Kecamatan Nuha Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Bab III ini menyajikan capaian kinerja Kecamatan Nuha Tahun 2025 sebagai hasil pelaksanaan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Capaian kinerja dianalisis berdasarkan indikator kinerja utama dan indikator kinerja pendukung yang menggambarkan tingkat keberhasilan Kecamatan Nuha dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan.

Pelaksanaan kinerja Tahun 2025 berada dalam konteks masa transisi perencanaan antara Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2021–2026 dan Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, pengukuran dan analisis capaian kinerja dilakukan dengan mempertimbangkan kesinambungan sasaran dan indikator kinerja, sekaligus menegaskan bahwa pada Triwulan IV Tahun 2025 arah kinerja telah mengacu pada Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2025–2029 sebagai dasar perencanaan dan pengendalian kinerja yang baru.

Analisis capaian kinerja organisasi pada bab ini tidak hanya menyajikan perbandingan antara target dan realisasi kinerja, tetapi juga memuat penilaian terhadap faktor pendukung dan penghambat, serta upaya perbaikan yang dilakukan. Dengan pendekatan tersebut, Bab III diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai tingkat efektivitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan Nuha Tahun 2025, serta menjadi dasar dalam peningkatan kinerja organisasi pada periode perencanaan selanjutnya.

Untuk memberikan gambaran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran dilakukan pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja capaian dilakukan dengan mengukur pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dengan membandingkan antara target dan realisasi. Secara ringkas capaian kinerja Sasaran Strategis Kecamatan Nuha pada periode ini, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel. 3.1

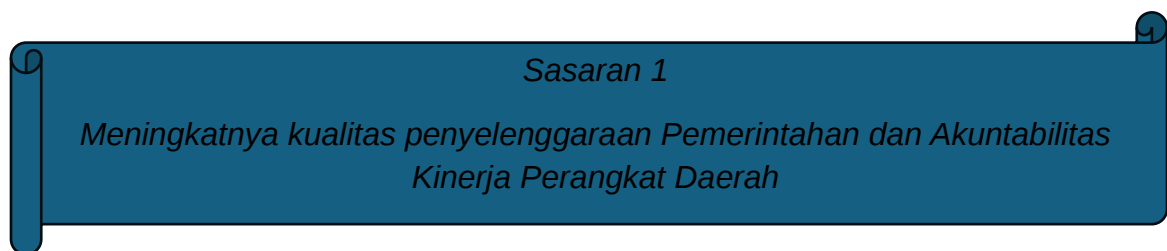
Pengukuran Capaian Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja
Kecamatan Nuha Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2025		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (realisasi berdasarkan LHE Lkj Tw IV 2025)	Nilai AKIP	66	79,60	120,60%
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,50	81,37	99,84%
	SASARAN PROGRAM				
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100%	99,40%	99,40%
4	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	100%
5	Meningkatnya pelaksanaan	Persentase Capaian Kinerja	100%	100%	100%

	Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan			
6	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	100%	100%	100%
8	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100%	100%	100%

➤ **SASARAN STRATEGIS**

Berikut akan dijabarkan secara rinci hasil pengukuran kinerja setiap sasaran strategis :



Defenisi operasional dari sasaran ini adalah kondisi di mana organisasi atau instansi publik menunjukkan peningkatan dalam tanggung jawab, transparansi, dan kejelasan dalam pengelolaan sumber daya serta pencapaian hasil kerja. meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan tercermin dari perbaikan sistem pelaporan, peningkatan transparansi, serta konsistensi dalam pencapaian hasil dan pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab.

Nama Indikator	Nilai AKIP
Interpretasi	sistem yang digunakan pemerintah (pusat dan daerah) untuk memastikan bahwa setiap program/kegiatan yang dilaksanakan berorientasi pada hasil (outcome) dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Rumus Perhitungan	$\text{Nilai AKIP} = (0,10 \times \text{nilai perencanaan Kinerja}) + (0,15 \times \text{Nilai Pengukuran Kinerja}) + (0,10 \times \text{Nilai Pelaporan Kinerja}) + (0,10 \times \text{nilai Evaluasi Kinerja}) + (0,55 \times \text{Nilai capaian Kinerja})$ - Keterangan : - Sangat Memuaskan (AA) (90-100) : Kinerja sangat akuntabel, penggunaan anggaran sangat efisien dan efektif, fokus pada hasil. - Memuaskan (A) (80-<90) : Akuntabilitas tinggi, program berjalan efektif dan efisien - Baik (BB) (70-<80) : Sudah menunjukkan efisiensi dan efektivitas, namun masih ada ruang perbaikan. - Cukup Baik (B) (60-<70) : Akuntabilitas dasar telah ada, tetapi belum sepenuhnya fokus pada hasil - Kurang Baik (CC) (50-<60) : Masih fokus pada input dan output, belum efektif dalam pencapaian hasil - Buruk (D) (<50) : Rendahnya akuntabilitas, penggunaan anggaran tidak berorientasi hasil
Sumber Data	Inspektorat Kab. Luwu Timur
OPD Penanggungjawab	Kecamatan Nuha

Sasaran 2

Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat

Definisi operasional dari sasaran ini mengacu pada peningkatan kapasitas dan kualitas aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, yang diukur melalui **survey Kepuasan Masyarakat**. Meningkatnya kemampuan pelayanan publik berarti adanya perbaikan dalam aspek kompetensi aparatur, efektivitas proses pelayanan, serta kualitas hasil pelayanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Peningkatan ini tercermin dari naiknya nilai IKM yang menunjukkan persepsi positif masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh kecamatan.

Indikator Pengukuran (berdasarkan IKM):

1. Kualitas Pelayanan: Ketepatan, kejelasan, dan kemudahan prosedur pelayanan publik.
2. Kecepatan dan Ketepatan Waktu: Waktu penyelesaian pelayanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Kompetensi dan Sikap Petugas: Kemampuan, keramahan, dan tanggung jawab aparatur dalam melayani masyarakat.
4. Keadilan dan Kepastian Layanan: Kesenjangan dalam pemberian layanan tanpa diskriminasi.
5. Sarana dan Prasarana: Ketersediaan fasilitas pendukung pelayanan yang memadai dan nyaman.

Cara Pengukuran:

Peningkatan kemampuan pelayanan publik diukur melalui perbandingan nilai IKM dari periode sebelumnya dengan periode berjalan. Kenaikan nilai IKM menunjukkan adanya peningkatan kemampuan pelayanan publik penyelenggaraan urusan pemerintahan kecamatan.

Nama Indikator	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Interpretasi	Indeks Kepuasan Masyarakat memberikan gambaran objektif mengenai persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik. Nilai IKM yang tinggi mencerminkan keberhasilan instansi dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, sedangkan nilai rendah menjadi sinyal perlunya peningkatan kinerja dan perbaikan sistem pelayanan agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Rumus Perhitungan	$X = \frac{Y}{\text{Nilai Dasar}}$ dimana X = nilai indeks Y = nilai survey kepuasan masyarakat (SKM) setelah dikonversi Nilai Dasar = 25 Predikat/kategori capaian IKM yang diatur dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai berikut : - Nilai Interval 88,31-100 Kategori A Predikat Sangat Baik - Nilai Interval 76,61-88,30 Kategori B Predikat Baik - Nilai Interval 65-76,60 kategori C Predikat Kurang Baik - Nilai interval 25-64,99 kategori D Predikat Tidak Baik
Sumber Data	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Nuha
OPD Penanggungjawab	Kecamatan Nuha

Dengan demikian, peningkatan kemampuan pelayanan publik dapat dinyatakan terjadi apabila nilai IKM mengalami kenaikan dan berada pada kategori yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya.

➤ **SASARAN PROGRAM**

Sasaran 3

Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi

Sasaran ini dipilih untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan penunjang urusan perangkat daerah di Kecamatan Nuha dilaksanakan secara tertib, terencana, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kegiatan penunjang memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan, khususnya dalam aspek perencanaan, penganggaran, administrasi, kepegawaian, dan pelaporan. Dengan optimalnya pelaksanaan kegiatan penunjang, diharapkan seluruh program dan kegiatan utama kecamatan dapat berjalan efektif dan memberikan dukungan nyata terhadap pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan.

Indikator Kinerja

- Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar

Nama Indikator	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar
Interpretasi	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar menggambarkan tingkat keterlaksanaan seluruh kegiatan penunjang urusan perangkat daerah yang dilaksanakan oleh kecamatan sesuai dengan standar operasional prosedur, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dokumen perencanaan dan penganggaran yang berlaku, sebagai bentuk dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan.

Rumus Perhitungan	(Realisasi dibagi target) X 100 %
Sumber Data	Bagian Sekretariat Kec. Nuha
OPD Penanggungjawab	Kecamatan Nuha

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
1.	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100%	Target 100% pada indikator Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa seluruh kegiatan penunjang merupakan fungsi wajib kecamatan yang harus dilaksanakan secara menyeluruh sesuai standar operasional prosedur, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dokumen perencanaan yang berlaku. Penetapan target ini juga diselaraskan dengan Renstra Kecamatan dan kebutuhan untuk memastikan dukungan administrasi, perencanaan, keuangan, dan kepegawaian berjalan optimal dalam mendukung pencapaian kinerja utama kecamatan, sehingga target tersebut dinilai realistis dan dapat dicapai..

Sasaran 4

Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik

Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan kecamatan yang efektif, efisien, akuntabel, serta berorientasi pada kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Kecamatan

Nuha berupaya memastikan seluruh fungsi pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur, serta prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pencapaian sasaran ini difokuskan pada penguatan kapasitas kelembagaan dan aparatur, peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik, serta optimalisasi koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Nuha. Dengan demikian, diharapkan terwujud pelayanan publik yang cepat, tepat, dan mudah diakses, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah kecamatan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan dasar di tingkat Kecamatan

Indikator Kinerja :

“Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik”

Nama Indikator	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
Interpretasi	Indikator Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik menunjukkan tingkat keberhasilan Kecamatan Nuha dalam melaksanakan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Indikator ini menggambarkan sejauh mana pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik telah berjalan efektif, efisien, dan sesuai standar pelayanan, ditinjau dari kesesuaian antara perencanaan dan realisasi kinerja, sehingga mencerminkan kualitas tata kelola pemerintahan kecamatan serta kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat..
Rumus Perhitungan	$(\text{Realisasi dibagi target}) \times 100 \%$
Sumber Data	Seksi Pelayanan Umum Kec. Nuha
OPD Penanggungjawab	Kecamatan Nuha

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
1.	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	Target indikator Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik ditetapkan sebesar 100% karena seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan dalam Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan kewajiban pemerintahan yang harus dilaksanakan secara penuh oleh Kecamatan Nuha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelayanan yang berlaku. Penetapan target ini mencerminkan komitmen kecamatan untuk melaksanakan seluruh fungsi pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal, tanpa mengurangi kualitas maupun cakupan layanan kepada masyarakat.

Sasaran 5

Meningkatnya pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Sasaran Meningkatkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan ditetapkan untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang mandiri, partisipatif, dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan di wilayah Kecamatan Nuha. Melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, kecamatan berperan dalam memfasilitasi, mengoordinasikan, dan membina pemerintah desa dan kelurahan serta masyarakat agar mampu mengoptimalkan potensi lokal, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat, dan memperkuat peran serta masyarakat dalam proses pembangunan.

Pencapaian sasaran ini diarahkan pada peningkatan kualitas perencanaan partisipatif, penguatan kelembagaan kemasyarakatan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia masyarakat desa dan kelurahan. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan selaras

dengan kebijakan pembangunan daerah, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung terciptanya pembangunan yang inklusif di Kecamatan Nuha.

Indikator Kinerja :

“Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan”

Nama Indikator	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan
Interpretasi	Indikator Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan menggambarkan tingkat keberhasilan Kecamatan Nuha dalam melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana upaya fasilitasi, pembinaan, dan pendampingan kepada pemerintah desa dan kelurahan serta masyarakat telah berjalan efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat kelembagaan kemasyarakatan, dan mengembangkan potensi lokal. Semakin tinggi persentase capaian indikator ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan Nuha telah terlaksana secara optimal, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah. Sebaliknya, capaian yang belum optimal menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program agar pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat...
Rumus Perhitungan	$(\text{Realisasi dibagi target}) \times 100 \%$
Sumber Data	Seksi Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kec. Nuha
OPD Penanggungjawab	Kecamatan Nuha

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
1.	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	Target indikator Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan ditetapkan sebesar 100% karena seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat yang direncanakan dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan merupakan fungsi fasilitasi dan pembinaan yang wajib dilaksanakan oleh Kecamatan Nuha sesuai dengan kewenangannya. Penetapan target ini mencerminkan komitmen kecamatan untuk melaksanakan seluruh program dan kegiatan pemberdayaan secara menyeluruh, terencana, dan berkesinambungan dalam satu periode perencanaan. Selain itu, target 100% menunjukkan bahwa seluruh rencana kerja yang telah disusun diharapkan dapat direalisasikan sepenuhnya, baik dalam aspek pembinaan kelembagaan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat, maupun penguatan kapasitas desa dan kelurahan. Dengan tercapainya target ini, diharapkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Nuha..

Sasaran 6

Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

Sasaran Meningkatkan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan ditetapkan untuk mewujudkan kondisi wilayah Kecamatan Nuha yang aman, tertib, dan kondusif sebagai prasyarat utama bagi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kehidupan bermasyarakat. Melalui Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Kecamatan Nuha berperan dalam mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mendukung pelaksanaan upaya penegakan ketenteraman dan ketertiban umum bersama unsur terkait di tingkat kecamatan.

Pencapaian sasaran ini diarahkan pada peningkatan efektivitas koordinasi lintas sektor, penguatan peran aparat dan kelembagaan kewilayahan, serta peningkatan responsivitas terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum. Dengan demikian, diharapkan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum dapat dilaksanakan secara terpadu, preventif, dan berkelanjutan, sehingga mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta mendukung stabilitas sosial di wilayah Kecamatan Nuha

Indikator Kinerja :

“Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum”

Nama Indikator	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum
Interpretasi	Indikator Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum menggambarkan tingkat keberhasilan Kecamatan Nuha dalam melaksanakan Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator ini mencerminkan efektivitas koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan yang dilakukan kecamatan bersama unsur terkait dalam menjaga kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif, yang diukur melalui perbandingan antara target dan realisasi kinerja dari seluruh kegiatan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum. Semakin tinggi persentase capaian indikator ini menunjukkan bahwa pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Nuha telah berjalan secara optimal, responsif, dan berkelanjutan dalam mendukung rasa aman serta kenyamanan masyarakat.
Rumus Perhitungan	$(\text{Realisasi} \div \text{target}) \times 100 \%$
Sumber Data	Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kec. Nuha
OPD Penanggungjawab	Kecamatan Nuha

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
1.	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan		Target indikator Persentase rata-rata capaian kinerja pelayanan ketenteraman dan ketertiban

	Ketenteraman dan ketertiban umum	100%	umum ditetapkan sebesar 100% karena pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan fungsi dasar pemerintahan yang wajib dilaksanakan secara optimal dan berkesinambungan oleh Kecamatan Nuha sesuai dengan kewenangannya. Seluruh kegiatan dalam Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum telah direncanakan untuk menjamin terciptanya kondisi wilayah yang aman dan tertib, sehingga dituntut untuk dapat direalisasikan secara penuh dalam satu periode perencanaan. Penetapan target 100% juga mencerminkan komitmen kecamatan untuk melaksanakan seluruh rencana koordinasi, fasilitasi, dan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum tanpa pengurangan cakupan maupun kualitas pelayanan. Dengan tercapainya target ini, diharapkan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Nuha dapat berjalan secara efektif, responsif, dan terkoordinasi, serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat serta mendukung stabilitas sosial di wilayah kecamatan.
--	----------------------------------	------	--

Sasaran 7

Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum ditetapkan untuk memastikan terselenggaranya urusan pemerintahan umum di wilayah Kecamatan Nuha secara efektif, terkoordinasi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, kecamatan berperan dalam melaksanakan fungsi pembinaan wawasan kebangsaan, koordinasi antar unsur pemerintahan, pemeliharaan persatuan dan kesatuan, serta fasilitasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum di tingkat kecamatan.

Pencapaian sasaran ini diarahkan pada peningkatan kualitas koordinasi dan sinergi antar instansi vertikal, perangkat daerah, serta unsur masyarakat dalam rangka menjaga stabilitas pemerintahan dan sosial kemasyarakatan. Dengan demikian, penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Nuha diharapkan dapat berjalan secara tertib,

kondusif, dan berkelanjutan, serta mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan

Indikator Kinerja :

“Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan”

Nama Indikator	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan
Interpretasi	Indikator Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan menggambarkan tingkat keberhasilan Kecamatan Nuha dalam melaksanakan Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator ini mencerminkan sejauh mana pelaksanaan fungsi pemerintahan umum—meliputi koordinasi antar unsur pemerintahan, pembinaan wawasan kebangsaan, pemeliharaan persatuan dan kesatuan, serta fasilitasi tugas-tugas pemerintahan umum—telah dilaksanakan secara efektif dan terkoordinasi. Semakin tinggi persentase capaian indikator ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan Nuha berjalan optimal, tertib, dan kondusif dalam mendukung stabilitas pemerintahan, ketenteraman sosial, serta kelancaran pembangunan di wilayah kecamatan
Rumus Perhitungan	$(\text{Realisasi} \div \text{target}) \times 100 \%$
Sumber Data	Seksi Pemerintahan Umum Kec. Nuha
OPD Penanggungjawab	Kecamatan Nuha

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
1.	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	100%	Target indikator Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan ditetapkan sebesar 100% karena penyelenggaraan urusan pemerintahan umum merupakan tugas dan kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Nuha secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan peraturan

			perundang-undangan. Seluruh kegiatan yang direncanakan dalam Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum disusun untuk mendukung terciptanya stabilitas pemerintahan, ketenteraman sosial, serta kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah kecamatan, sehingga diharapkan dapat direalisasikan sepenuhnya dalam satu periode perencanaan. Penetapan target 100% juga mencerminkan komitmen Kecamatan Nuha untuk melaksanakan seluruh fungsi pemerintahan umum—meliputi koordinasi antar unsur pemerintahan, pembinaan wawasan kebangsaan, serta pemeliharaan persatuan dan kesatuan—secara optimal tanpa pengurangan kualitas maupun cakupan kegiatan. Dengan tercapainya target tersebut, diharapkan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dapat berjalan secara efektif, tertib, dan kondusif, serta memberikan dukungan yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Nuha.
--	--	--	---

Sasaran 8

Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

Sasaran Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa ditetapkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Melalui Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Kecamatan Nuha berperan dalam melakukan pembinaan, fasilitasi, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan desa berjalan secara efektif dan bertanggung jawab.

Pencapaian sasaran ini diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur desa, tertib administrasi pemerintahan desa, serta kepatuhan terhadap regulasi dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan desa. Dengan demikian, diharapkan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Nuha mampu

menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, profesional, dan berkelanjutan, serta mendukung terwujudnya pembangunan desa yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.

Indikator Kinerja :

“Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku”

Nama Indikator	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku
Interpretasi	Indikator Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku menggambarkan tingkat kepatuhan dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Nuha terhadap regulasi, pedoman teknis, serta standar administrasi pemerintahan desa. Indikator ini mencerminkan keberhasilan pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa melalui pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan yang dilakukan kecamatan terhadap pemerintah desa, khususnya dalam aspek tata kelola pemerintahan, administrasi desa, pengelolaan keuangan, dan pelaksanaan pembangunan desa. Semakin tinggi persentase capaian indikator ini menunjukkan bahwa pemerintahan desa telah berjalan secara tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan, sehingga mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan desa yang berkelanjutan di Kecamatan Nuha.
Rumus Perhitungan	$(\text{Realisasi dibagi target}) \times 100 \%$
Sumber Data	Seksi Pemerintahan Umum Kec. Nuha
OPD Penanggungjawab	Kecamatan Nuha

Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENJELASAN
1.	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100%	Target indikator Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan sebesar 100% karena seluruh desa di wilayah Kecamatan Nuha wajib menyelenggarakan pemerintahan sesuai dengan

			regulasi dan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang tertib, akuntabel, dan transparan, sehingga dituntut untuk dapat dipenuhi secara menyeluruh tanpa pengecualian. Penetapan target 100% juga mencerminkan komitmen Kecamatan Nuha dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan secara optimal terhadap seluruh pemerintah desa. Dengan tercapainya target ini, diharapkan seluruh desa mampu menjalankan pemerintahan dan pembangunan desa sesuai standar, meminimalkan potensi penyimpangan administrasi maupun keuangan, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pencapaian pembangunan desa yang selaras dengan kebijakan pembangunan daerah
--	--	--	--

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Perbandingan antara target dan realisasi untuk Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.

Perbandingan Antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN PREDIKAT	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah(berdasarkan LHE TW IV 2025)	Nilai AKIP	66	79,60	120,60%	BB

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PREDIKAT
Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,50	81,37	99,84%	baik
SASARAN PROGRAM					
Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100%	99,40%	99,40%	sangat Tinggi
Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Meningkatnya pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PREDIKAT
	kecamatan				
Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Sumber: Kecamatan Nuha Tahun 2025

1. Analisis Perbandingan target dan realisasi pada Sasaran Strategis

Pada sasaran strategis **Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah**, indikator yang digunakan adalah Nilai AKIP. Target yang ditetapkan sebesar 66, sementara realisasi yang dicapai sebesar 79,65, sehingga tingkat capaian mencapai 120,60% dengan predikat BB. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja organisasi dalam aspek akuntabilitas dan pengelolaan kinerja telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan, serta evaluasi internal yang dilakukan secara lebih efektif. Melampauinya target yang telah ditetapkan juga mencerminkan semakin kuatnya komitmen organisasi dalam mengimplementasikan prinsip **akuntabilitas, transparansi, dan orientasi pada hasil** dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian, capaian ini tetap perlu dipertahankan melalui penguatan integrasi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pengukuran kinerja agar peningkatan nilai akuntabilitas dapat berkelanjutan pada periode berikutnya.

Pada sasaran strategis kedua yaitu **Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat**, indikator yang digunakan adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Target yang ditetapkan sebesar 81,50, sedangkan realisasi mencapai 81,37, sehingga tingkat capaian sebesar 99,84% dengan predikat Baik. Meskipun realisasi sedikit berada di bawah target, capaian ini masih menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat tetap berada pada kategori baik dan relatif stabil.

2. Analisis Perbandingan Target dan Realisasi pada Sasaran Program

Pada tingkat sasaran program, sebagian besar indikator kinerja menunjukkan capaian yang sangat baik dengan realisasi yang sama dengan target yang telah ditetapkan.

- Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar memiliki target 100% dengan realisasi 99,40% sehingga tingkat capaian mencapai 99,40%. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh kegiatan penunjang perangkat daerah telah berjalan sesuai standar yang ditetapkan, meskipun masih terdapat sedikit ruang untuk perbaikan dalam aspek efektivitas pelaksanaan kegiatan.
- Pada indikator Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan, Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan, serta Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Berjalan Sesuai Standar, seluruhnya menunjukkan target 100% dengan realisasi 100% sehingga tingkat capaian juga 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kecamatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun lalu Dan Beberapa Tahun terakhir

Tabel 3.3

Perbandingan realisasi kinerja Tahun Ini dengan beberapa tahun terakhir

No	Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi	Predikat
1	2	3	5	7
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	2022	80,05	BAIK
		2023	80,62	BAIK
		2024	81,02	BAIK
		2025	81,37	BAIK
2	Nilai Akip	2022	58,40	CC

No	Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi	Predikat
1	2	3	5	7
		2023	62,50	B
		2024	64,70	B
		2025 (berdasarkan LHE TW IV 2025)	79,60	BB
3	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	2022	100%	
		2023	100%	
		2024	98,71	
		2025	99,40	
4	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	2022	100%	
		2023	100%	
		2024	100%	
		2025	100%	
5	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat	2022	100%	

No	Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi	Predikat
1	2	3	5	7
	Desa dan Kelurahan			
		2023	100%	
		2024	100%	
		2025	100%	
6	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	2022	100%	
		2023	100%	
		2024	100%	
		2025	100%	
7	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	2022	100%	
		2023	100%	
		2024	100%	
		2025	100%	
8	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan	2022	100%	

No	Indikator Kinerja	Tahun	Realisasi	Predikat
1	2	3	5	7
	ketentuan perundangan yang berlaku			
		2023	100%	
		2024	100%	
		2025	100%	

Sumber : Kecamatan Nuha 2025

Analisis Perbandingan Realisasi Kinerja Beberapa Tahun Terakhir

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Perkembangan capaian **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** selama periode 2022–2025 menunjukkan tren peningkatan yang relatif konsisten. Pada tahun 2022 nilai IKM tercatat sebesar **80,05** dengan predikat **Baik**, kemudian meningkat menjadi **80,62** pada tahun 2023 dan **81,02** pada tahun 2024. Pada tahun 2025 nilai IKM kembali meningkat menjadi **81,37** dan tetap berada pada kategori **Baik**. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya peningkatan standar pelayanan, perbaikan prosedur layanan, serta peningkatan kompetensi aparatur telah memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Meskipun peningkatannya bersifat gradual, tren positif ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik semakin baik dan perlu terus ditingkatkan agar dapat mencapai kategori yang lebih tinggi pada periode mendatang.

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Capaian Nilai AKIP menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Pada tahun 2022 nilai AKIP berada pada angka 58,40 dengan predikat CC, kemudian meningkat menjadi 62,50 pada tahun 2023 dengan predikat B, dan kembali meningkat menjadi 64,70 pada tahun 2024 dengan predikat B. Peningkatan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2025 dimana nilai AKIP mencapai 79,60 dengan predikat BB. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan yang cukup substansial dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terutama pada aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal. Peningkatan nilai AKIP ini juga mencerminkan semakin baiknya integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program yang berorientasi pada hasil.

3. Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar

Indikator **Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar** menunjukkan capaian yang relatif stabil dengan tingkat realisasi yang sangat tinggi. Pada tahun 2022 dan 2023 capaian indikator ini mencapai **100%**, kemudian mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024 menjadi **98,71%**. Pada tahun 2025 capaian kembali meningkat menjadi **99,40%**. Meskipun terjadi fluktuasi kecil, secara umum capaian indikator ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan penunjang perangkat daerah telah berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Penurunan kecil pada tahun 2024 kemungkinan dipengaruhi oleh faktor teknis pelaksanaan kegiatan atau keterbatasan dukungan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan penunjang.

4. Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Capaian indikator **Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik** menunjukkan tingkat realisasi yang sangat baik dan konsisten selama periode 2022–2025. Selama empat tahun terakhir capaian indikator ini selalu berada pada angka **100%**, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik telah dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan. Konsistensi capaian ini menggambarkan bahwa fungsi koordinasi, fasilitasi, serta pelayanan yang dilaksanakan oleh kecamatan berjalan secara efektif dan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan..

5. Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pada indikator **Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan**, capaian kinerja selama periode 2022–2025 juga menunjukkan hasil yang sangat baik dengan tingkat realisasi **100% setiap tahun**. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian ini juga mengindikasikan bahwa peran kecamatan dalam melakukan pembinaan, fasilitasi, serta koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat berjalan secara efektif

6. Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

Realisasi indikator ini juga menunjukkan **capaian 100% secara berkelanjutan** pada Tahun 2022–2025. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan telah berjalan sesuai standar operasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Capaian tersebut mencerminkan adanya **koordinasi yang baik dengan aparat keamanan dan unsur terkait**, serta responsivitas terhadap potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

7. Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan

Indikator **Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan** menunjukkan capaian **100% pada Tahun 2022–2025**. Hal ini mengindikasikan bahwa seluruh urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan kecamatan telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Capaian ini menggambarkan stabilitas dan konsistensi kinerja kecamatan dalam menjalankan fungsi koordinasi, fasilitasi, serta pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah kerja.

8. Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Berjalan Sesuai Standar dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Realisasi indikator ini menunjukkan **capaian 100% secara konsisten** pada Tahun 2022–2025. Hal ini menandakan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa telah berjalan efektif, sehingga seluruh desa mampu menyelenggarakan pemerintahan sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

Capaian ini mencerminkan keberhasilan program pembinaan pemerintahan desa dalam meningkatkan **kepatuhan regulasi, tertib administrasi, serta kualitas tata kelola pemerintahan desa**.

Kesimpulan Umum

Secara keseluruhan, analisis masing-masing indikator menunjukkan bahwa **kinerja kecamatan selama periode 2022–2025 berada pada kondisi yang stabil dan cenderung meningkat**, terutama pada indikator yang berkaitan dengan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja. Sementara itu, indikator pada tingkat program menunjukkan capaian yang konsisten sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan telah berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2025 Dengan Target Jangka Menengah Dalam Renstra

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 terhadap Renstra Kecamatan Nuha sebagai berikut:

Tabel 3.4.

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Kecamatan Nuha 2025-2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tw IV	Target Renstra
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Nuha	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,50	81,37	82,65
2	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan keuangan (berdasarkan LHE Tw IV 2025)	Nilai Akip	66	79,60	70,50
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100%	99,40%	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi Tw IV	Target Renstra
	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100%	100%	100%
	Meningkatnya pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100%	100%	100%
	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Capaian Kinerja Pelayanan ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	100%	100%	100%
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	100%	100%	100%
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100%	100%	100%

Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra Kecamatan Nuha 2025–2029

1. Sasaran: Meningkatkan Kemampuan Pelayanan Publik Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan Nuha

Indikator: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2025 ditetapkan sebesar **81,50**, sedangkan realisasi yang dicapai sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sebesar **81,37**. Jika dibandingkan dengan target tahunan, capaian ini berada sedikit di bawah target yang ditetapkan dengan selisih yang sangat kecil. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan **target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar 82,65**, maka capaian tahun 2025 telah mencapai sekitar **98,45%** dari target akhir tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Nuha telah berada pada jalur yang cukup baik menuju pencapaian target jangka menengah. Meskipun demikian, masih diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan melalui penyempurnaan standar pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, serta optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan agar target akhir Renstra dapat tercapai secara optimal

2. Sasaran: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Indikator: Nilai AKIP

Pada indikator **Nilai AKIP**, target kinerja tahun 2025 ditetapkan sebesar **66**, sedangkan realisasi berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Triwulan IV Tahun 2025 mencapai **79,60**. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja akuntabilitas perangkat daerah tidak hanya melampaui target tahunan tetapi juga telah **melampaui target akhir Renstra Tahun 2029 yang ditetapkan sebesar 70,50**. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khususnya dalam aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kecamatan Nuha telah mampu mengimplementasikan sistem pengelolaan kinerja yang lebih baik dan berorientasi pada hasil. Ke depan, capaian ini perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui penguatan integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja.

3. Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi

Indikator: Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar

Target indikator pada Tahun 2025 sebesar **100%**, dengan realisasi TW IV mencapai **99,40%**. Capaian ini menunjukkan bahwa target hampir sepenuhnya tercapai, meskipun masih terdapat **selisih kecil sebesar 0,53%** dibandingkan target tahunan maupun **Target Akhir Renstra sebesar 100%**.

Secara umum, indikator ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi penunjang perangkat daerah telah berjalan sangat baik, dan selisih yang terjadi tidak berdampak signifikan terhadap kinerja secara keseluruhan.

4. Sasaran: Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator: Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Target Tahun 2025 ditetapkan sebesar **100%**, dan realisasi TW IV juga mencapai **100%**, sama dengan **Target Akhir Renstra sebesar 100%**. Hal ini menunjukkan bahwa indikator ini telah **tercapai sepenuhnya dan konsisten**.

Capaian tersebut mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program, serta kesesuaian antara target tahunan dan target strategis Renstra.

5. Sasaran: Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator: Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Realisasi indikator ini pada Tahun 2025 mencapai **100%**, sesuai dengan target tahunan dan **Target Akhir Renstra sebesar 100%**. Hal ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan telah dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan perencanaan jangka menengah.

6. Sasaran: Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

Indikator: Persentase Capaian Kinerja Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

Capaian kinerja Tahun 2025 mencapai **100%**, sama dengan target tahunan dan **Target Akhir Renstra sebesar 100%**. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di Kecamatan Nuha telah berjalan sesuai standar dan mampu memenuhi target strategis yang ditetapkan.

7. Sasaran: Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator: Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Kecamatan

Realisasi indikator pada Tahun 2025 mencapai **100%**, sesuai dengan target tahunan dan target akhir Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan

pemerintahan umum di Kecamatan Nuha telah terlaksana secara optimal dan konsisten.

8. Sasaran: Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator: Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang Berjalan Sesuai Standar dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Realisasi indikator pada Tahun 2025 mencapai **100%**, sesuai dengan target tahunan dan **Target Akhir Renstra sebesar 100%**. Capaian ini mencerminkan efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa yang dilakukan oleh Kecamatan Nuha.

Kesimpulan Umum

Secara keseluruhan, hasil perbandingan antara capaian kinerja tahun 2025 dengan target akhir Renstra Kecamatan Nuha Tahun 2025–2029 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah berada pada jalur yang tepat bahkan beberapa indikator telah mencapai atau melampaui target jangka menengah. Indikator Nilai AKIP bahkan telah melampaui target akhir Renstra, sementara indikator lainnya telah mencapai target maksimal atau mendekati target yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Nuha telah berjalan efektif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis perangkat daerah.

D.Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Regional/Nasional

Analisis perbandingan capaian kinerja Kecamatan Tahun 2025 dengan target nasional dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi kinerja perangkat daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan pada tingkat nasional. Perbandingan ini penting sebagai bagian dari evaluasi kinerja guna memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kecamatan sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta mendukung pencapaian indikator kinerja yang menjadi prioritas pemerintah. Melalui analisis ini dapat diketahui posisi capaian kinerja Kecamatan Nuha terhadap standar atau target nasional, sehingga dapat menjadi dasar dalam melakukan perbaikan kebijakan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan akuntabel pada periode perencanaan berikutnya.

Berikut tabel perbandingan Realisasi kinerja Kecamatan Nuha dengan Target Nasional yang bersumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi :

Tabel 3.5

Perbandingan realisasi kinerja 2025 Kecamatan Nuha dengan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	5
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	NASIONAL	78,8
		Kec. Nuha	81,37
2	Nilai AKIP (berdasarkan LHE tw IV 2025 Kec. Nuha)	NASIONAL	81,15
		NUHA	79,60

Perbandingan realisasi kinerja Kecamatan Nuha Tahun 2025 dengan target nasional bertujuan untuk mengetahui posisi capaian kinerja kecamatan dalam mendukung standar kinerja yang telah ditetapkan secara nasional. Indikator yang digunakan dalam perbandingan ini merujuk pada indikator yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), yaitu **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** dan **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**. Melalui perbandingan ini dapat diketahui sejauh mana kualitas pelayanan publik dan penerapan akuntabilitas kinerja di Kecamatan Nuha telah sejalan dengan target nasional.

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Berdasarkan data yang tersedia, target nasional untuk **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** ditetapkan sebesar **78,8**, sedangkan realisasi yang dicapai oleh Kecamatan Nuha pada Tahun 2025 sebesar **81,37**. Dengan demikian, capaian IKM Kecamatan Nuha telah **melampaui target nasional** dengan selisih sebesar **2,57 poin**.

Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Kecamatan Nuha kepada masyarakat berada di atas standar nasional yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh kecamatan, seperti penerapan standar pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur, serta perbaikan mekanisme pelayanan kepada masyarakat telah memberikan dampak positif terhadap tingkat kepuasan masyarakat. Ke depan, capaian

ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui inovasi pelayanan publik serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan.

2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Pada indikator **Nilai AKIP**, target nasional yang ditetapkan sebesar **81,15**, sedangkan realisasi nilai AKIP Kecamatan Nuha berdasarkan **Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Triwulan IV Tahun 2025** sebesar **79,60**. Dengan demikian, capaian nilai AKIP Kecamatan Nuha masih berada **di bawah target nasional** dengan selisih sebesar **1,55 poin**.

Meskipun demikian, capaian tersebut menunjukkan bahwa penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kecamatan Nuha telah berjalan cukup baik dan berada pada kategori yang relatif tinggi. Selisih yang tidak terlalu besar dari target nasional menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja telah berjalan pada arah yang tepat. Peningkatan nilai AKIP pada tahun-tahun sebelumnya juga menunjukkan adanya tren perbaikan dalam pengelolaan kinerja organisasi, terutama dalam aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal.

Untuk meningkatkan capaian nilai AKIP agar dapat mendekati bahkan melampaui target nasional, diperlukan beberapa upaya perbaikan, antara lain melalui peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan kinerja, penguatan integrasi antara perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja, serta optimalisasi fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

Kesimpulan Analisis

Secara umum, hasil perbandingan menunjukkan bahwa **kinerja Kecamatan Nuha pada indikator pelayanan publik telah melampaui standar nasional**, sedangkan pada indikator akuntabilitas kinerja masih memerlukan peningkatan agar dapat mencapai target nasional yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kecamatan Nuha telah berada pada tingkat yang baik, sementara penguatan sistem akuntabilitas kinerja masih perlu terus dilakukan secara berkelanjutan. Upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan implementasi SAKIP secara konsisten diharapkan dapat mendorong peningkatan nilai AKIP pada periode berikutnya sehingga dapat mencapai bahkan melampaui target nasional.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan, Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan

1. Sasaran Strategis: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator : Nilai AKIP

Target : 66

Realisasi : 79,60

Capaian : 120,60%

- **Penyebab Keberhasilan**

Keberhasilan capaian indikator ini ditunjukkan dengan realisasi nilai AKIP sebesar 79,65 dari target 66 atau 120,68%, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini dipengaruhi oleh semakin baiknya implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), khususnya dalam penyelarasan antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja. Selain itu, meningkatnya komitmen pimpinan serta aparatur dalam menerapkan manajemen kinerja berbasis hasil juga berkontribusi terhadap peningkatan nilai AKIP.

- **Penyebab Peningkatan Kinerja**

Peningkatan nilai AKIP dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh meningkatnya kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, penguatan fungsi monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dari pemerintah daerah dan aparat pengawasan internal. Tidak terdapat penurunan kinerja pada indikator ini, melainkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

- **Solusi yang Dilakukan**

Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut antara lain dengan meningkatkan kapasitas aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja, memperkuat integrasi antara perencanaan dan penganggaran, serta meningkatkan kualitas monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Target : 81,50

Realisasi : 81,37

Capaian : 98,45%

- **Penyebab Kegagalan**

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar **81,37** dari target **81,50** atau **99,84%** menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik berada pada kategori baik meskipun sedikit di bawah target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang diberikan oleh kecamatan telah berjalan dengan

cukup baik, didukung oleh penerapan standar pelayanan serta upaya peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

- **Penyebab Peningkatan/Penurunan Kinerja**

Peningkatan kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh adanya perbaikan sistem pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur pelayanan, serta upaya penyederhanaan prosedur pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, belum tercapainya target secara penuh dapat dipengaruhi oleh meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan serta keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan.

- **Solusi yang Dilakukan**

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik antara lain melalui peningkatan kompetensi aparatur pelayanan, perbaikan sarana dan prasarana pelayanan, serta penguatan penerapan standar pelayanan publik guna meningkatkan kepuasan masyarakat

Analisis Sasaran Program

3. Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Kegiatan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi

Indikator : Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar

Target : 100%

Realisasi : 99,40%

Capaian : 99,40%

Analisis:

Capaian hampir memenuhi target, namun Pencapaian kinerja yang tidak mencapai target tersebut dipengaruhi oleh capaian realisasi anggaran yang juga tidak memenuhi target 100%

Penyebab:

- Terdapat salah satu capaian kinerja kegiatan yang ditentukan oleh Realisasi .Anggaran

Solusi alternatif:

- Perlu dilakukan kaji ulang formulasi penentuan capaian kinerja kegiatan yang harusnya tidak didasarkan pada realisasi anggaran

4. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Indikator: Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Target/Realisasi/Capaian: 100%

Analisis:

Target telah tercapai sepenuhnya, menunjukkan pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik berjalan **efektif dan sesuai rencana**.

Faktor keberhasilan:

- Perencanaan program yang jelas dan terukur.
- Koordinasi internal yang baik.

Solusi penguatan:

- Menjaga konsistensi pelaksanaan dan kualitas pelayanan.

5. Meningkatnya Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Indikator : Persentase capaian kinerja pemberdayaan masyarakat
Target/Realisasi/Capaian : 100%

Analisis:

Seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan sesuai target.

Penyebab keberhasilan:

- Keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan.
- Sinkronisasi program dengan kebutuhan lokal.

Solusi penguatan:

- Peningkatan kualitas dampak pemberdayaan masyarakat.

6. Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan

Indikator : Persentase capaian kinerja pelayanan trantibum

Target/Realisasi/Capaian: 100%

Analisis:

Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum berjalan optimal dan sesuai target.

Solusi penguatan:

- Mempertahankan sinergi dengan aparat keamanan dan masyarakat.

7. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Indikator : Persentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum
Target/Realisasi/Capaian: 100%

Analisis:

Seluruh urusan pemerintahan umum terlaksana sesuai rencana.

Solusi penguatan:

- Peningkatan kualitas koordinasi lintas sektor.

8. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Indikator: Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai ketentuan
Target/Realisasi/Capaian: 100%

Analisis:

Pembinaan dan pengawasan desa berjalan efektif dan sesuai regulasi.

Solusi penguatan:

- Penguatan monitoring dan pendampingan berkelanjutan.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi sumber daya pada tingkat kecamatan merupakan indikator penting dalam menilai kemampuan wilayah dalam mengelola potensi yang dimiliki untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya manusia dan keuangan, serta infrastruktur. Analisis ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kecamatan mampu memanfaatkan sumber daya tersebut secara optimal guna meningkatkan kualitas pelayanan public

Tabel 3.6

Perbandingan antara target dan realisasi kinerja dan anggaran

NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN(Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA (%)	ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5	6	7=(5/4)	8=(6/4)
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100 %	3,760,959,558	3,584,477,458	99,40%	3,402,712,512	99,40 %	94.9%
I.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	29,868,300	32,961,450	100%	32,526,950	100%	98.7%
I.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	16,810,900	17,909,000	2 Dokumen	17,706,500	100 %	98.9%
I.1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2,778,100	2,263,650	2 Dokumen	2,213,650	100%	97.8%
I.1.3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2 Dokumen	2,054,900	1,641,400	2 Dokumen	1,641,400	100%	100.0%
I.1.4.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	8,224,400	11,147,400	10 Dokumen	10,965,400	100 %	98.4%
I.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	2,791,510,802	2,575,156,052	95,23 %	2,447,765,774	95,23 %	95.23%
I.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang	2,766,550,802	2,550,196,052	23 Orang	2,422,805,774	100%	95.0%
I.2.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran	12 Laporan	24,960,000	24,960,000	12 Lapor	24,960,000	100%	100.0%

NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN(Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA (%)	ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5	6	7=(5/4)	8=(6/4)
	SKPD				an			
1.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	25,494,500	24,822,100	12 %	23,882,100	100 %	96.2%
1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	25,494,500	24,822,100	4 Laporan	23,882,100	100%	96.2%
1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	49,903,750	31,763,250	100 %	26,450,010	100 %	83.3%
1.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Laporan	19,838,750	12,425,250	12 Laporan	12,166,250	100 %	97.9%
1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	7 Orang	30,065,000	19,338,000	7 Orang	14,283,760	100%	73.9%
1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	417,531,190	519,575,190	100%	506,307,390	100 %	97.4%
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Paket	7,433,000	9,603,000	100 Paket	9,603,000	100 %	100.0%
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perengkapan Kantor	2 paket	6,597,500	6,597,500	2 paket	6,597,500	100%	100.0%
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15 Paket	9,531,040	13,286,040	15 Paket	13,281,040	100 %	100.0%

NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN(Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA (%)	ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5	6	7=(5/4)	8=(6/4)
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5 Paket	21,349,650	19,858,650	5 Paket	18,018,650	100 %	90.7%
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	10,920,000	10,920,000	12 Dokumen	10,625,000	100%	97.3%
1.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	164,700,000	260,350,000	12 Laporan	253,776,000	100 %	97.5%
1.5.7	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	197,000,000	198,960,000	12 Laporan	194,406,200	100 %	97.7%
1.6	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	100%	10,300,000	10,300,000	100%	9,845,850	100%	95.6%
1.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	10,300,000	10,300,000	1 Unit	9,845,850	100%	95.6%
1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	362,331,016	315,409,416	100 %	293,410,342	100 %	93.0%
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	27,732,100	28,810,500	12 Laporan	24,401,042	100 %	84.7%
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	34,598,916	34,598,916	12 Laporan	18,259,300	100%	52.8%
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	300,000,000	252,000,000	12	250,750,000	100 %	99.5%

NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN(Rp)	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA (%)	ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5	6	7=(5/4)	8=(6/4)
	Umum Kantor				Laporan			
1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	100 %	74,020,000	74,490,000	100 %	62,524,096	100 %	83.9%
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	9 Unit	39,900,000	39,900,000	9 Unit	28,858,971	100 %	72.3%
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15 Unit	8,630,000	7,880,000	15 Unit	7,006,375	100%	88.9%
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	2 Unit	20,000,000	20,000,000	2 Unit	19,995,000	100%	100.0%
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	11 unit	5,490,000	6,710,000	11 Unit	6,663,750	100%	99.3%

NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGRAN(Rp.)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA (%)	ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5	6	7=(5/3)	8=(6/4)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100%	8.095.000	7,434,850	100%	7,061,750	100 %	95.0%
1.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100%	8.095.000	7,434,850	100 %	7,061,750	100 %	95.0%
1.1.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	12 Dokumen	8.095,000	7,434,850	12 Dokumen	7,061,750	100%	95.0%
2.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	100%	297.275.45 0	321,644,950	100 %	315,349,91 6	100%	98.0%
2.1.	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa	100%	97.275.45 0	121,644,950	100 %	116,209,41 6	100%	95.5%
2.1.1.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	2	17.807.85 0	16,030,050	2 Lembaga Kemasyar akatan	15,263,050	100 %	95.2%
2.1.2.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	4	79.467.60 0	105,614,900	4 Laporan	100,946,36 6	100 %	95.6%
2.2.	Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	100 %	200.000.0	200,000,000	100%	199,140,50	100%	99.6%

NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGRAN(Rp.)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA (%)	ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5	6	7=(5/3)	8=(6/4)
			00			0		
2.1.1.	Pemberdayaan masyarakat dikelurahan	2 Lembaga Kemasyar akatan	200.000.0 00	200,000,000	2 Lembaga Kemasyar akatan	199,140,50 0	100 %	99.6%
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	100 %	16.079.50 0	20,050,850	100 %	19,862,250	100 %	99.1%
3.1.	Koordinasi upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100 %	11.889.70 0	16,495,400	100%	16,404,000	100 %	99.4%
3.1.1.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	7.724.150	13,744,900	4 Laporan	13,664,000	100 %	99.4%
3.1.2.	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	4.165.550	2,750,500	4 Laporan	2,740,000	100 %	99.6%
3.2.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100 %	4.189.800	3,555,450	100 %	3,458,250	100 %	97.3%
3.2.1.	Koordinasi/ Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan	4 Laporan	4.189.800	3,555,450	4 Laporan	3,458,250	100 %	97.3%

NO	SASARAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET			REALISASI		CAPAIAN	
		KINERJA	ANGGRAN(Rp.)	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	KINERJA	ANGGARAN (Rp.)	KINERJA (%)	ANGGARAN (%)
1	2	3	4		5	6	7=(5/3)	8=(6/4)
	Perundang-Undangan dan/atau POLRI							
4.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	100 %	35.263.05 0	32,623,000	100 %	32,163,500	100 %	98.6%
4.1.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	100 %	35.263.05 0	32,623,000	100 %	32,163,500	100 %	98.6%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Laporan	35.263.05 0	32,623,000	12 Laporan	32,163,500	100%	98.6%
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 %	10.333.20 0	10,291,350	100 %	9,886,950	100 %	96.1%
5.1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	10.333.20 0	10,291,350	100%	9,886,950	100 %	96.1%
5.1.1.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4 Laporan	3.044.500	2,787,150	4 Laporan	2,767,750	100 %	99.3%
5.1.2.	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	12 Laporan	7.288.700	7,504,200	12 Laporan	7,119,200	100%	94.9%

➤ Analisis Efisiensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Secara umum, efisiensi pemanfaatan SDM Kecamatan Nuha tergolong sangat baik. Hal ini tercermin dari:

✚ Capaian kinerja program dan kegiatan rata-rata mencapai 100%, meskipun terdapat penyesuaian dan efisiensi anggaran pada hampir seluruh sub kegiatan. Dengan jumlah pegawai yang relatif terbatas (21 orang), Kecamatan mampu menyelesaikan seluruh target output, baik administrasi pemerintahan, pelayanan publik, ketenteraman dan ketertiban umum, hingga pemberdayaan masyarakat.

✚ Distribusi peran SDM berjalan optimal, di mana:

- Pejabat struktural (8 orang) berperan efektif dalam fungsi koordinasi, pengendalian, dan pengambilan keputusan.
- PNS dan PPPK pelaksana (11 orang) mampu menangani beban kerja teknis-administratif yang cukup tinggi, termasuk penyusunan dokumen perencanaan, laporan keuangan, pelayanan publik, serta fasilitasi kegiatan masyarakat.
- Tenaga cleaning service (2 orang) mendukung keberlangsungan operasional kantor tanpa menambah beban biaya berlebih.

☐ Kesimpulan SDM: Kecamatan mampu memaksimalkan kapasitas SDM yang ada secara efisien dan produktif, tanpa penambahan pegawai, serta tetap menghasilkan kinerja yang optimal.

➤ Analisis Efisiensi Sumber Daya Keuangan

Dari sisi keuangan, pelaksanaan program menunjukkan efisiensi anggaran yang signifikan tanpa menurunkan capaian kinerja, dengan indikator sebagai berikut:

✚ Rasio efisiensi anggaran mayoritas berada pada kisaran 94%–99%, bahkan pada beberapa sub kegiatan berada di bawah 90%, namun kinerja tetap mencapai 100%. Contohnya:

- Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik dengan realisasi anggaran sekitar 52,8%, namun capaian kinerja tetap 100%.
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan efisiensi anggaran hingga 83,3%, tetap menghasilkan output sesuai target.

✚ Program penunjang urusan pemerintahan daerah sebagai penyerap anggaran terbesar menunjukkan efisiensi yang baik, dengan realisasi anggaran sekitar 94,9% dan capaian kinerja 99,47%, menandakan

pengelolaan belanja yang efektif dan terkendali.

- ✚ Efisiensi juga terlihat pada program-program substantif seperti:
 - Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (realisasi $\pm 95\%$),
 - Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan ($\pm 98\%$),
 - Ketenteraman dan ketertiban umum ($\pm 99\%$),
 - Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa ($\pm 96\%$).

- ✚ Penghematan anggaran diperoleh melalui:
 - Penyesuaian volume dan kebutuhan riil kegiatan,
 - Optimalisasi sarana dan prasarana yang telah tersedia,
 - Pengendalian belanja operasional dan jasa penunjang.

➡ Kesimpulan Keuangan: Anggaran digunakan secara hemat, tepat sasaran, dan proporsional, dengan hasil kinerja yang tetap maksimal.

➤ Kesimpulan Umum Efisiensi Sumber Daya

Secara keseluruhan, Kecamatan menunjukkan tingkat efisiensi sumber daya yang sangat baik, ditandai dengan:

- ✚ Kinerja hampir seluruh program dan kegiatan mencapai 100%,
- ✚ Realisasi anggaran lebih rendah dari pagu setelah efisiensi,
- ✚ SDM yang terbatas mampu mengelola beban kerja lintas program secara optimal.

Efisiensi ini mencerminkan pengelolaan organisasi yang efektif, perencanaan yang matang, serta komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, meskipun dalam kondisi keterbatasan sumber daya.

G. Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Analisis program yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja merupakan langkah penting dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan. Melalui analisis ini, dapat diidentifikasi sejauh mana program yang dijalankan berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat atau pendukung keberhasilannya. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk perbaikan strategi, peningkatan efisiensi, dan penguatan akuntabilitas kinerja di masa mendatang

Analisis Program yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Secara umum, program ini menunjukkan capaian kinerja 99,40% dengan realisasi anggaran 94,9%, yang menandakan pelaksanaan kegiatan berjalan sangat baik dan efisien. Hampir seluruh subkegiatan mencapai target 100% kinerja, meskipun terdapat sedikit deviasi pada efisiensi anggaran.

- Faktor Keberhasilan:
 - Perencanaan dan penganggaran perangkat daerah terlaksana tepat waktu dan sesuai target (100%).
 - Administrasi keuangan dan kepegawaian berjalan optimal dengan realisasi kinerja penuh.
 - Dukungan kegiatan administrasi umum, seperti penyediaan logistik, rapat koordinasi, dan kunjungan tamu, terlaksana dengan baik.
- Faktor Kegagalan/Perlu Perbaikan:
 - Efisiensi anggaran pada kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik hanya mencapai 52,8%, menunjukkan adanya potensi penghematan atau kendala teknis dalam realisasi pembayaran.
 - Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan hanya mencapai 73,9% dari anggaran, mengindikasikan perlunya peningkatan efektivitas pelaksanaan pelatihan.
 - Pemeliharaan kendaraan dinas juga masih rendah (72,3%), kemungkinan karena keterlambatan proses administrasi atau efisiensi biaya operasional.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini menunjukkan capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran 95%, menandakan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif dan efisien.

- Faktor Keberhasilan:
 - Seluruh kegiatan pelayanan publik dan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat terlaksana sesuai target.
 - Efisiensi penggunaan anggaran menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik tanpa mengurangi kualitas layanan.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini mencapai kinerja 100% dengan realisasi anggaran 98%, menunjukkan keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

- Faktor Keberhasilan:
 - Kegiatan pemberdayaan di desa dan kelurahan terlaksana dengan baik,

dengan partisipasi masyarakat meningkat.

- Efektivitas kegiatan pemberdayaan di wilayah kecamatan mencapai 95,6%, menunjukkan koordinasi yang baik antar pihak.
- Faktor Kegagalan/Perlu Perbaikan:
 - Perlu peningkatan efisiensi dalam pengelolaan anggaran agar tidak terjadi selisih antara anggaran perubahan dan realisasi.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program ini menunjukkan capaian kinerja 100% dengan realisasi anggaran 99,1%, menandakan pelaksanaan kegiatan sangat baik.

- Faktor Keberhasilan:
 - Sinergitas dengan TNI, POLRI, dan instansi vertikal berjalan efektif (99,4%).
 - Hubungan dengan tokoh masyarakat dan agama terjaga baik, mendukung stabilitas wilayah.
- Faktor Kegagalan/Perlu Perbaikan:
 - Tidak ditemukan kendala signifikan, namun perlu menjaga konsistensi koordinasi lintas sektor agar capaian tetap optimal.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Program ini mencapai kinerja 100% dengan realisasi anggaran 98,6%, menunjukkan pelaksanaan kegiatan berjalan efektif.

- Faktor Keberhasilan:
 - Kegiatan koordinasi pimpinan di kecamatan terlaksana sesuai target dan mendukung kelancaran pemerintahan umum.
 - Efisiensi anggaran menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Program ini mencapai kinerja 100% dengan realisasi anggaran 96,1%, menunjukkan pelaksanaan kegiatan berjalan baik.

- Faktor Keberhasilan:
 - Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan koordinasi pembangunan kawasan perdesaan terlaksana sesuai target.
 - Tingkat capaian kinerja menunjukkan efektivitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.
- Faktor Kegagalan/Perlu Perbaikan:
 - Perlu peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan agar realisasi anggaran lebih optimal.

Kesimpulan Umum:

Secara keseluruhan, seluruh program menunjukkan kinerja sangat baik ($\geq 99\%$) dengan efisiensi anggaran rata-rata 95–98%. Faktor utama keberhasilan adalah perencanaan yang matang, koordinasi antarperangkat daerah yang efektif, serta pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran. Namun, beberapa kegiatan teknis seperti pemeliharaan kendaraan, pelatihan, dan penyediaan jasa komunikasi perlu evaluasi agar efisiensi dan efektivitas pelaksanaan dapat ditingkatkan di periode berikutnya.

3.2. REALISASI ANGGARAN

Jumlah anggaran Kecamatan Nuha Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan melalui APBD Perubahan adalah sebesar **Rp 3,976,522,458,-** dan terealisasi sebesar **Rp. 3,787,036,878,-** dengan capaian realisasi anggaran sebesar **95,23%**. Gambaran realisasi anggaran Kantor Kecamatan Nuha Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.12.

Realisasi Anggaran Kecamatan Nuha Tahun 2025

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5= (4/3)*100
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,584,477,458	3,402,712,512	94.9%
I.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32,961,450	32,526,950	98.7%
I.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17,909,000	17,706,500	98.9%
I.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2,263,650	2,213,650	97.8%
I.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,641,400	1,641,400	100.0%
I.1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11,147,400	10,965,400	98.4%
I.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,575,156,052	2,447,765,774	95.1%
I.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,550,196,052	2,422,805,774	95.0%
I.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	24,960,000	24,960,000	100.0%
I.3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	24,822,100	23,882,100	96.2%

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5= (4/3)*100
I.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	24,822,100	23,882,100	96.2%
I.4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	31,763,250	26,450,010	83.3%
I.4.1	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12,425,250	12,166,250	97.9%
I.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	19,338,000	14,283,760	73.9%
I.5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	519,575,190	506,307,390	97.4%
I.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9,603,000	9,603,000	100.0%
I.5.2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	6,597,500	6,597,500	100.0%
I.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13,286,040	13,281,040	100.0%
I.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19,858,650	18,018,650	90.7%
I.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10,920,000	10,625,000	97.3%
I.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	260,350,000	253,776,000	97.5%
I.5.7	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	198,960,000	194,406,200	97.7%
I.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10,300,000	9,845,850	95.6%
I.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,300,000	9,845,850	95.6%
I.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	315,409,416	293,410,342	93.0%
I.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	28,810,500	24,401,042	84.7%
I.7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	34,598,916	18,259,300	52.8%
I.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	252,000,000	250,750,000	99.5%
I.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	74,490,000	62,524,096	83.9%
I.7.3	Pemeliharaan/rehabilitasi Bangunan Gedung/kantor	39,900,000	28,858,971	72.3%
I.7.4	Pemeliharaan sarana Dan Prasarana Gedung/kantor	7,880,000	7,006,375	88.9%
II.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7,434,850	7,061,750	95.0%

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = (4/3)*100
II.1.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7,434,850	7,061,750	95.0%
II.1.1	Pelaksanaan Urusan Pemeritahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	7,434,850	7,061,750	95.0%
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	321,644,950	315,349,916	98.0%
III.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	121,644,950	116,209,416	95.5%
III.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	16,030,050	15,263,050	95.2%
III.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	105,614,900	100,946,366	95.6%
III.2.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	200,000,000	199,140,500	99.6%
III.2.1	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	200,000,000	199,140,500	99.6%
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20,050,850	19,862,250	99.1%
IV.1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	16,495,400	16,404,000	99.4%
IV.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13,744,900	13,664,000	99.4%
IV.1.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2,750,500	2,740,000	99.6%
IV.2.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	3,555,450	3,458,250	97.3%
IV.2.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	3,555,450	3,458,250	97.3%
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32,623,000	32,163,500	98.6%
V.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	32,623,000	32,163,500	98.6%
V.1.1	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	32,623,000	32,163,500	98.6%

No	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5 = (4/3)*100
VI.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10,291,350	9,886,950	96.1%
VI.1.	Fasilitasi Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10,291,350	9,886,950	96.1%
VI.1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2,787,150	2,767,750	99.3%
VI.1.2	Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah kecamatan	7,504,200	7,119,200	94.9%

3.3 REKOMENDASI

Berdasarkan Laporan hasil Evaluasi Akip 2024 Kecamatan Nuha Nomor 700.1.2.1/085/III/ITKAB Tanggal 08 Maret 2025 terdapat hal-hal yang disarankan/direkomendasikan kepada Kecamatan Nuha diantaranya adalah sebagai berikut :

2. Publikasikan Dokumen perencanaan segera setelah di formalkan
3. Lengkapi CSF pada Pohon Kinerja
4. Jadikan Dokumen Laporan Kinerja sebagai dasar Perbaikan/perencanaan dokumen kinerja
5. Uraikan Cascading dan crosscutting secara detail
6. Perbaiki dokumen kinerja sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan
7. Jadikan pengukuran kinerja sebagai dasar penyesuaian strategi, kebijakan, dan aktivitas dalam mencapai kinerja
8. Agar memperbaiki formulasi perhitungan capaian kinerja kegiatan ‘pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat”
9. Agar Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi dan dilengkapi dengan bukti dukung
10. Agar memperbaiki sistematika penulisan pada laporan kinerja

3.4 TINDAK LANJUT

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 Kecamatan Nuha Nomor 700.1.2.1/085/III/ITKAB tanggal 08 Maret 2025, Kecamatan Nuha menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan sebagai upaya perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas penyelenggaraan akuntabilitas kinerja, dengan uraian sebagai berikut:

1. **Publikasikan Dokumen Perencanaan setelah Diformalisasi**
Kecamatan Nuha telah melakukan publikasi dokumen perencanaan seperti Renstra, Renja, dan Perjanjian Kinerja melalui media yang tersedia, baik melalui papan informasi maupun media elektronik, sehingga dokumen tersebut dapat diakses oleh masyarakat dan pemangku kepentingan setelah ditetapkan secara resmi.
2. **Melengkapi Critical Success Factor (CSF) pada Pohon Kinerja**
Kecamatan Nuha telah melakukan penyempurnaan pohon kinerja dengan menambahkan unsur **Critical Success Factor (CSF)** pada setiap sasaran strategis sebagai faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. **Menjadikan Dokumen Laporan Kinerja sebagai Dasar Perbaikan Dokumen Perencanaan**
Hasil evaluasi dalam dokumen laporan kinerja telah digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya, khususnya dalam penyempurnaan indikator kinerja, target kinerja, serta strategi pencapaian sasaran organisasi.
4. **Menguraikan Cascading dan Crosscutting secara Lebih Detail**
Kecamatan Nuha telah melakukan penyempurnaan terhadap dokumen cascading kinerja dengan menguraikan keterkaitan sasaran strategis hingga indikator kinerja pada level unit kerja serta memperjelas hubungan **crosscutting** antar program dan kegiatan yang saling mendukung dalam pencapaian sasaran organisasi.
5. **Perbaikan Dokumen Kinerja sebagai Dasar Penyempurnaan Dokumen Perencanaan**
Kecamatan Nuha telah melakukan penyesuaian dan penyempurnaan dokumen kinerja, termasuk indikator dan target kinerja, agar lebih selaras dengan dokumen perencanaan serta mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.
6. **Menjadikan Pengukuran Kinerja sebagai Dasar Penyesuaian Strategi dan Kebijakan**
Hasil pengukuran kinerja secara berkala telah digunakan sebagai bahan evaluasi dalam melakukan penyesuaian strategi, kebijakan, dan aktivitas organisasi guna meningkatkan efektivitas pencapaian kinerja pada periode berikutnya.
7. **Perbaikan Formulasi Perhitungan Capaian Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**
Formulasi yang ditetapkan untuk kegiatan telah disepakati oleh seluruh kecamatan dan telah dilakukan reviu
8. **Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Evaluasi dengan Bukti Dukung**
Seluruh rekomendasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan melakukan

perbaikan pada dokumen perencanaan, dokumen kinerja, serta dokumen laporan kinerja yang disertai dengan bukti dukung sebagai bahan verifikasi pada evaluasi berikutnya.

9. Perbaikan Sistematika Penulisan Laporan Kinerja

Kecamatan Nuha telah melakukan penyempurnaan sistematika penulisan laporan kinerja agar lebih sistematis, sesuai dengan pedoman penyusunan LKjIP, serta memuat analisis kinerja yang lebih komprehensif.

Secara keseluruhan, tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tersebut telah menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Kecamatan Nuha dalam meningkatkan kualitas penerapan SAKIP serta memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi. (matriks Tindak Lanjut LHE dan bukti dukung terlampir dalam lampiran dokumen ini)

.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Nuha Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Nuha dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan selama Tahun Anggaran 2025. Penyusunan laporan ini juga merupakan implementasi dari penerapan **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** yang menekankan pada pengukuran, evaluasi, serta pelaporan capaian kinerja organisasi berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi terhadap capaian kinerja Tahun 2025, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Nuha telah berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan sebagian besar indikator kinerja yang mampu mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan terdapat indikator yang melampaui target kinerja, khususnya pada indikator **Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**. Selain itu, indikator yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa juga menunjukkan capaian yang optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat telah berjalan secara efektif.

Kesimpulan Umum

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja Tahun 2025, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Secara umum kinerja Kecamatan Nuha dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik telah berjalan dengan baik, yang ditunjukkan dengan tercapainya sebagian besar indikator kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
2. Capaian indikator strategis seperti **Nilai AKIP** menunjukkan peningkatan yang signifikan dan bahkan melampaui target yang ditetapkan, yang mencerminkan

semakin baiknya penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Kecamatan Nuha.

3. Kualitas pelayanan publik kepada masyarakat juga menunjukkan kinerja yang baik, yang tercermin dari capaian **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** yang berada pada kategori baik.
4. Indikator pada tingkat program menunjukkan capaian yang sangat baik dengan tingkat realisasi yang sebagian besar mencapai **100%**, yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
5. Meskipun secara umum capaian kinerja sudah baik, masih terdapat beberapa aspek yang perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, penyempurnaan dokumen perencanaan dan kinerja, serta penguatan implementasi manajemen kinerja berbasis hasil.

Langkah Perbaikan Kinerja

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi pada periode berikutnya, Kecamatan Nuha akan melakukan beberapa langkah perbaikan kinerja, antara lain:

1. **Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja** melalui penyelarasan yang lebih baik antara dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan pengukuran kinerja.
2. **Meningkatkan kualitas pelayanan publik** dengan melakukan penyempurnaan standar pelayanan, peningkatan kompetensi aparatur pelayanan, serta perbaikan sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat.
3. **Memperkuat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)** melalui peningkatan kualitas pengukuran kinerja, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja sebagai dasar perbaikan kebijakan dan strategi organisasi.
4. **Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan**, baik pemerintah daerah, pemerintah desa, maupun masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayah kecamatan.

5. **Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur** melalui pembinaan, pelatihan, dan penguatan kompetensi aparatur dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

Dengan berbagai upaya perbaikan tersebut, diharapkan kinerja Kecamatan Nuha pada tahun-tahun mendatang dapat semakin meningkat serta mampu memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Nuha Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi serta dasar perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Nuha pada periode yang akan datang.

Sorowako, 13 Maret 2026



Kecamatan Nuha,

ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom, M.Si.

Pangkat : Pembina

NIP. 19810204 200902 1 001

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KECAMATAN NUHA
TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom., M.Si

Jabatan : CAMAT NUHA

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ir.H.IRWAN BACHRI SYAM, ST.IPM

Jabatan : BUPATI LUWU TIMUR

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini. Setiap keberhasilan atau pun kegagalan dalam pencapaian target kinerja tersebut akan menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak Kedua akan melakukan supervisi dan pendampingan yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja, juga akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak pertama dalam mencapai target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja ini.

Nuha, 01 Oktober 2025

Pihak Kedua,

Ir.H.IRWAN BACHRI SYAM, ST.IPM

Pihak Pertama,

ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom., M.Si

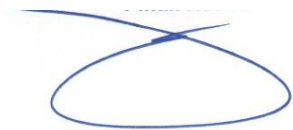
LAMPIRAN 1 PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KECAMATAN NUHA
TABEL KINERJA TAHUN 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	SASARAN		
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan dan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akip Perangkat Daerah	66 Nilai
2	meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan masyarakat (IKM)	81,5 Nilai
3	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kegiatan penunjang urusan perangkat Daerah Sesuai Tugas dan Fungsi	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah Berjalan Sesuai Standar	100%
4	Meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %
5	Meningkatnya pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	100 %
6	Meningkatnya Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	Persentase Rata-rata capaian kinerja pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum	100 %
7	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan	100 %
8	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku	100 %

	Program	Anggaran
	Program	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.584.477.458
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.434.850
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	321.644.950
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.050.850
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	32.623.000
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	10.291.350

Luwu Timur, 01 Oktober 2025

BUPATI LUWU TIMUR



Ir.H.IRWAN BACHRI SYAM.ST.IPM

CAMAT NUHA



ARIEF FADILLAH AMIER,S.Kom.,M.Si

Lampiran 2

Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

KECAMATAN NUHA

Alamat : Jln. Diponegoro No. 02 Sorowako 92984 Email : kcn.lutimkab@gmail.com

Sorowako, 06 Januari 2026

Nomor : 000.7.2.10/005/KCN
Lampiran : -
Hal : **Undangan Rapat**
Yth.
1. Sekertaris Camat
2. Kepala Seksi/Kasubag Kec.Nuha
3. Staf Kec.Nuha
di_ Tempat

Dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan **Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV dan Penyusunan LAKIP 2025**, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr(i) untuk hadir dalam rapat yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 07 Januari 2026
Pukul : 10.00 Wita-Selesai
Tempat : Aula Kantor Camat Nuha

Demikian disampaikan, atas kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.



ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom.M.Si

Pangkat: Pembina

NIP. 19810204 2009021 001

Tembusan:

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Ketua DPRD Kab.Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kab. Luwu Timur di Malili.



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN NUHA

Jalan Diponegoro No.02 Sorowako 92984 Sulawesi Selatan

DAFTAR HADIR
MONITORING EVALUASI RKPD TW. IV/LAKIP/LKPJ

No	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN	KET
			P	L		
1	Arif Fadilah Amir	Camat Nuha		L		
2	Kamil R.	SEKAS		L		
3	Raftrawati	Kasi. Permentaka		P		
4	Fatimah	Kasi TRANSIB		P		
5	Kasmiati	stap		P		
6	Syamsi Syam	-1-		P		
7	Husna	slup		P		
8	HASNIAH	PERENCANA		P		
9	Celly m.	Bendahara		P		
10	Rany Syam	Kasi. Pelaya Um		P		
11	Duburak	STAF		P		
12	Emmy. A.	STAF		P.		
13	Lina	Kab. Cag. Um + Ken		P		
14	Ira Puspa	Kasi PND		P		
15	Ekawati	STAF		P		
16	SEPI WAHYUNI	STAF		P		
17	Heni. A.	Stat.		P.		
18	Harmindrawaty	staf		P		
19	Harkini	stap		P		
20						

Mengetahui
Camat Nuha

ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom.M.Si
Nip. 198102042009021001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN NUHA

Jalan Diponegoro No.02 Sorowako 92984 Sulawesi Selatan

BERITA ACARA HASIL DESK EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Aula Kantor Camat Nuha yang bertanda-tangan dibawah ini :

I. Nama : **KAMIL RASYID, ST**
Nip : 19810511 200902 1 001
Jabatan : Sekretaris Camat
Alamat : Magani
Bertindak atas nama Camat Nuha untuk melakukan evaluasi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **IRA PUSPA, SE**
Nip : 19801227 200902 2 002
Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
Alamat : Sorowako
Bertindak sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Nuha untuk dilakukan evaluasi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Sesuai dengan hasil Desk Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Triwulan IV serta mencermati format pengendalian dan evaluasi RKPD Perangkat daerah Tahun 2025 Triwulan IV, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut

No.	Uraian	Jumlah	Realisasi	Presentase
1.	Anggaran	Rp 129.149.150	Rp 123.328.616	95,49 %
2.	Program	2	2	
3.	Kegiatan	2	2	
4.	Sub Kegiatan	3	3	

Secara rinci catatan permasalahan dan rekomendasi tindak lanjut menjadi lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

PIHAK KEDUA

IRA PUSPA, SE

Nip. 19801227 200902 2 002

PIHAK PERTAMA

KAMIL RASYID, ST

Nip. 19810511 200902 1 001



Mengetahui,
Camat Nuha

ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom

Nip. 198102042009021001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN NUHA

Jalan Diponegoro No.02 Sorowako 92984 Sulawesi Selatan

BERITA ACARA HASIL DESK EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Aula Kantor Camat Nuha yang bertanda-tangan dibawah ini :

I. Nama : **KAMIL RASYID, ST**
Nip : 19810511 200902 1 001
Jabatan : Sekretaris Camat
Alamat : Magani
Bertindak atas nama Camat Nuha untuk melakukan evaluasi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama : **FATIMAH, SE**
Nip : 19800101 200502 2 007
Jabatan : Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Alamat : Sorowako
Bertindak sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Nuha untuk dilakukan evaluasi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Sesuai dengan hasil Desk Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Triwulan IV serta mencermati format pengendalian dan evaluasi RKPD Perangkat daerah Tahun 2025 Triwulan IV, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut

No.	Uraian	Jumlah	Realisasi	Presentase
1.	Anggaran	Rp. 20.050.850	Rp. 19.862.250	99,10%
2.	Program	1	1	
3.	Kegiatan	2	2	
4.	Sub Kegiatan	3	3	

Secara rinci catatan permasalahan dan rekomendasi tindak lanjut menjadi lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

PIHAK KEDUA

FATIMAH, SE

Nip. 19800101 200502 2 007

PIHAK PERTAMA

KAMIL RASYID, ST

Nip. 19810511 200902 1 001

Mengetahui,
Camat Nuha

ARIEF PADILLAH AMIER, S.Kom
Nip. 198102042009021001





PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN NUHA

Jalan Diponegoro No.02 Sorowako 92984 Sulawesi Selatan

BERITA ACARA HASIL DESK EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Aula Kantor Camat Nuha yang bertanda-tangan dibawah ini :

- I. Nama : **KAMIL RASYID, ST**
Nip : 19810511 200902 1 001
Jabatan : Sekretaris Camat
Alamat : Magani

Bertindak atas nama Camat Nuha untuk melakukan evaluasi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : **RACHMAWATI, S.Kom**
Nip : 19810504 200604 2 017
Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan Umum
Alamat : Magani

Bertindak sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Umum Kecamatan Nuha untuk dilakukan evaluasi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Sesuai dengan hasil Desk Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Triwulan IV serta mencermati format pengendalian dan evaluasi RKPD Perangkat daerah Tahun 2025 Triwulan IV, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut

No.	Uraian	Jumlah	Realisasi	Presentase
1.	Anggaran	Rp 35.410.150	Rp 34.931.250	98,64%
2.	Program	2	2	
3.	Kegiatan	2	2	
4.	Sub Kegiatan	2	2	

Secara rinci catatan permasalahan dan rekomendasi tindak lanjut menjadi lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

PIHAK KEDUA

RACHMAWATI, S.Kom

Nip. 19810504 200604 2 017

PIHAK PERTAMA

KAMIL RASYID, ST

Nip. 19810511 200902 1 001



Mengetahui,
Camat Nuha

ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom

Nip. 198102042009021001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN NUHA

Jalan Diponegoro No.02 Sorowako 92984 Sulawesi Selatan

BERITA ACARA HASIL DESK EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Aula Kantor Camat Nuha yang bertanda-tangan dibawah ini :

- I. Nama : **KAMIL RASYID, ST**
Nip : 19810511 200902 1 001
Jabatan : Sekretaris Camat
Alamat : Magani
Bertindak atas nama Camat Nuha untuk melakukan evaluasi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Nama : **HASNIAR, S.Sos**
Nip : 19830305 200604 2 020
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan & Kepegawaian
Alamat : Malili
Bertindak sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Kecamatan Nuha untuk dilakukan evaluasi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Sesuai dengan hasil Desk Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Triwulan IV serta mencermati format pengendalian dan evaluasi RKPD Perangkat daerah Tahun 2025 Triwulan IV, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah	Realisasi	Presentase
1.	Anggaran	Rp. 64.724.700	Rp. 58.976.960	91,11 %
2.	Program	1	1	
3.	Kegiatan	2	2	
4.	Sub Kegiatan	6	6	

Secara rinci catatan permasalahan dan rekomendasi tindak lanjut menjadi lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

PIHAK KEDUA

HASNIAR, S.Sos

Nip. 19830305 200604 2 020

PIHAK PERTAMA

KAMIL RASYID, ST

Nip. 19810511 200902 1 001

Mengetahui,
Camat Nuha

ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom
Nip. 198102042009021001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN NUHA

Jalan Diponegoro No.02 Sorowako 92984 Sulawesi Selatan

BERITA ACARA HASIL DESK EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Tujuh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Aula Kantor Camat Nuha yang bertanda-tangan dibawah ini :

- I. Nama : **KAMIL RASYID, ST**
Nip : 19810511 200902 1 001
Jabatan : Sekretaris Camat
Alamat : Magani

Bertindak atas nama Camat Nuha untuk melakukan evaluasi, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama : **LINA BATE BANDERA, S.M**
Nip : 19780903 201101 2 008
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
Alamat : Sorowako

Bertindak sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Kecamatan Nuha untuk dilakukan evaluasi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Sesuai dengan hasil Desk Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 Triwulan IV serta mencermati format pengendalian dan evaluasi RKPD Perangkat daerah Tahun 2025 Triwulan IV, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut

No.	Uraian	Jumlah	Realisasi	Presentase
1.	Anggaran	Rp. 3.619.752.756	Rp. 3.349.765.552	99,99 %
2.	Program	1	1	
3.	Kegiatan	6	6	
4.	Sub Kegiatan	18	18	

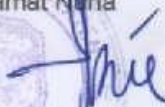
Secara rinci catatan permasalahan dan rekomendasi tindak lanjut menjadi lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari berita acara ini.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

LINA BATE BANDERA, S.M
Nip. 19780903 201101 2 008

KAMIL RASYID, ST
Nip. 19810511 200902 1 001

Mengetahui,
Camat Nuha

ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom
Nip. 198102042009021001

Rapat Monitoring dan Evaluasi Triwulan IV dan Penyusunan LAKIP
2025,Tanggal 07 Januari 2026 di Aula Kantor Camat Nuha







PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KECAMATAN NUHA

Jl. Diponegoro No. 02 Telp/Fax (0475) 321 258 Sorowako 92984

NOTULA RAPAT MONITORING DAN EVALUASI KINERJA DAN ANGGARAN TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2025 KECAMATAN NUHA

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Januari 2025

Waktu : Pukul 09.00 Wita

Tempat : Aula Kantor Kecamatan Nuha

Agenda Rapat : Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Triwulan IV

Pimpinan Rapat : Camat Nuha

Notulis : HASNIAR,S.Sos

A. DAFTAR HADIR

(Terlampir)

Peserta rapat terdiri dari:

- Camat Nuha
- Sekretaris Kecamatan Nuha
- Para Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian
- Pelaksana terkait

B. URAIAN JALANNYA RAPAT

1. Pembukaan

Rapat dibuka oleh Camat Nuha pada pukul 09.41 WITA. Dalam sambutannya, Camat Nuha menyampaikan bahwa rapat monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan untuk menilai capaian kinerja dan realisasi anggaran Triwulan IV serta sebagai bahan evaluasi akhir tahun.

2. Pemaparan Capaian Kinerja dan Anggaran

Sekretaris Kecamatan menyampaikan gambaran umum realisasi kinerja dan anggaran Triwulan IV, dengan poin-poin sebagai berikut:

- Sebagian besar program dan kegiatan Kecamatan Nuha telah mencapai target kinerja 100%;
- Realisasi anggaran menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, dengan tetap mempertahankan capaian output;

- Terdapat beberapa sub kegiatan dengan efisiensi anggaran cukup tinggi tanpa mempengaruhi capaian kinerja.

3. **Pembahasan Permasalahan dan Kendala**

Dalam sesi diskusi, beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain:

- Masih perlunya peningkatan ketepatan waktu penyampaian laporan kegiatan;
- Kebutuhan penguatan dokumentasi pendukung kegiatan sebagai bukti kinerja;
- Perlunya evaluasi internal secara berkala pada masing-masing seksi.

4. **Tanggapan dan Arahan Pimpinan**

Camat Nuha menekankan pentingnya:

- Menjadikan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar perbaikan kinerja pada periode berikutnya;
- Meningkatkan koordinasi antar seksi dan sub bagian;
- Menyusun laporan kinerja dan keuangan secara lebih tertib, lengkap, dan akuntabel.

C. **HASIL KEPUTUSAN RAPAT**

1. Seluruh seksi dan sub bagian diminta untuk menindaklanjuti hasil evaluasi kinerja dan anggaran Triwulan IV.
2. Setiap kegiatan wajib dilengkapi dengan dokumentasi pendukung yang memadai (daftar hadir, notula, laporan kegiatan).
3. Evaluasi mandiri kinerja dan anggaran akan dilaksanakan secara rutin pada setiap triwulan berikutnya.
4. Hasil rapat ini menjadi bahan penyusunan laporan kinerja akhir tahun Kecamatan Nuha.

D. **PENUTUP**

Rapat ditutup oleh Camat Nuha pada pukul 15.00 WITA. Diharapkan seluruh hasil keputusan rapat dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab guna meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Kecamatan Nuha.

Pimpinan Rapat



ARIEF FADILLAH AMIER, S.Kom, M.Si
NIP.19810204 200902 1 001

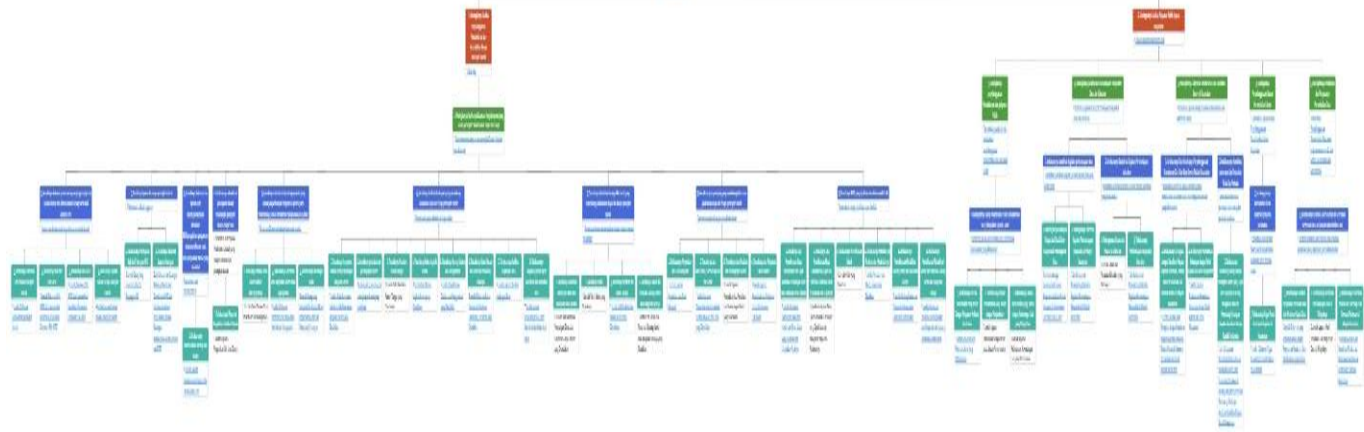
Nuha, 07 Januari 2026

Notulis

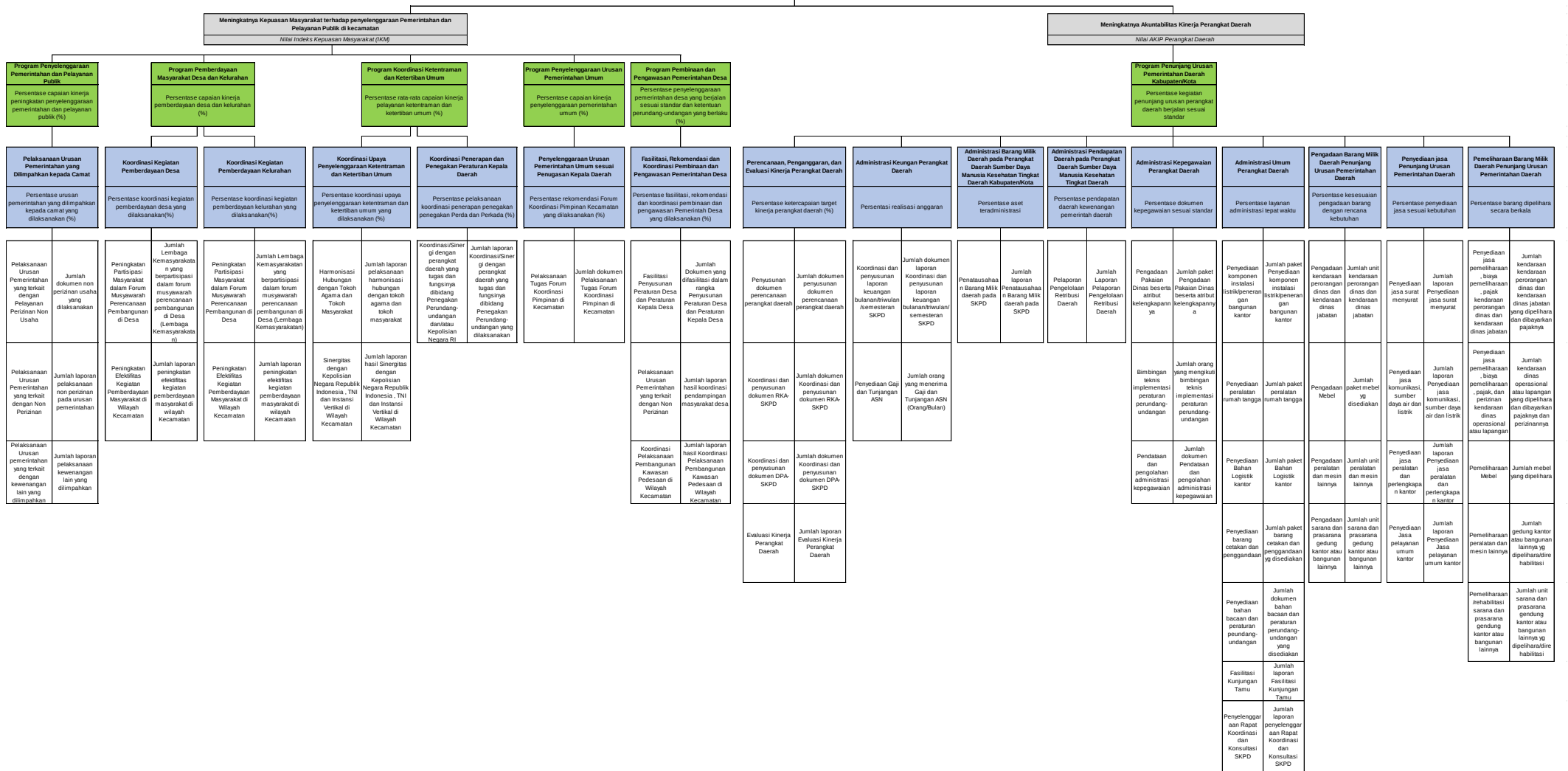
Kasubag Perencanaan dan Kepegawaian

HASNIAR, S.Sos
NIP.19830305 200604 2 020

[!\[\]\(a1fa6d13b995f7ea30f914a0f0048723_img.jpg\)
 Download](#)



Tercapainya tata kelola pemerintahan berintegritas dan adaptif (I6)	Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah (S13)	Indeks Pelayanan Publik Nilai AKIP
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang menjadi Kewenangan Kecamatan	Indeks Pelayanan Publik Nilai AKIP



CROSSCUTTING KECAMATAN NUHA

